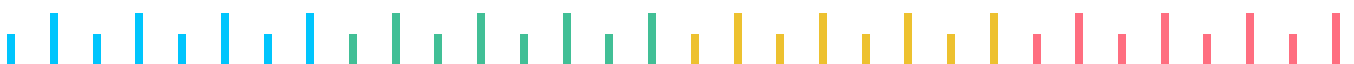


→ LAPORAN RISET

MENANGKAL MISINFORMASI KRISIS IKLIM DI INDONESIA



DIDUKUNG OLEH
APNIC FOUNDATION,
MELALUI INFORMATION SOCIETY INNOVATION FUND (ISIF ASIA)



PENULIS

- NOVI KURNIA
- TREVILIANA EKA PUTRI
- AMELINDA PANDU KUSUMANINGTYAS
- FIRYA QURRATU'AIN ABISONO
- ALFREDO PUTRAWIDJOYO
- MUHAMMAD PERDANA SASMITA-JATI KARIM
- BHREDIPTA CRESTI SOCARANA

PENYUNTING

- NOVI KURNIA
- FIRYA QURRATU'AIN ABISONO

PROOFREADER

- SYAIFA TANIA
- MUHAMMAD HAFIZ NOER

DESAIN SAMPUL

- RIAWAN HANIF ALIFADECYA

TATA LETAK & GRAFIS

- FIRYA QURRATU'AIN ABISONO
- RIAWAN HANIF ALIFADECYA





RINGKASAN EKSEKUTIF



Misinformasi merupakan salah satu tantangan yang paling banyak ditemukan dalam perkembangan teknologi digital dewasa ini. Dari beragam jenis misinformasi yang beredar sangat cepat di Indonesia, misinformasi mengenai krisis iklim sering dianggap sebagai misinformasi yang tidak 'berbahaya' sekaligus risikonya rendah dan tidak langsung terlihat—jika dibandingkan misalnya dengan misinformasi terkait pandemi COVID-19, maupun misinformasi politik yang risikonya terlihat baik di bidang kesehatan maupun politik. Padahal, misinformasi krisis iklim berpotensi untuk memicu kerusakan lingkungan serta perubahan penting ekosistem bumi yang akan merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Penelitian yang berjudul “Menangkal Misinformasi Krisis Iklim di Indonesia” dilakukan berdasarkan keprihatinan terhadap persebaran misinformasi iklim yang semakin banyak ditemukan, namun di sisi lain, perhatian untuk menangkalnya masih cukup terbatas. Hal ini semakin diperparah dengan temuan riset berbasis survei yang dilakukan oleh YouGov yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah climate-change deniers (penyangkal krisis iklim) tertinggi di dunia serta berpotensi tinggi untuk mempercayai misinformasi krisis iklim sekaligus menyebarkannya. Misinformasi krisis iklim patut diperhatikan karena dua hal. Pertama, misinformasi krisis iklim membuat orang ragu atau semakin ragu terhadap konsensus krisis iklim. Kedua, misinformasi krisis iklim membuat orang tidak percaya atau ragu terhadap sains yang mempelajari krisis iklim. Akibatnya, misinformasi krisis iklim memiliki peran langsung dalam menopang krisis iklim dan menghambat aksi atau kebijakan krisis iklim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana pemahaman, pola konsumsi dan kemampuan literasi digital pengguna internet Indonesia terkait misinformasi krisis iklim? Kedua, bagaimana ragam misinformasi krisis iklim yang ditemukan dan diverifikasi oleh beragam sumber cek fakta terpercaya di Indonesia?

Pertanyaan pertama dijawab dengan melakukan survei daring yang dilakukan pada bulan Agustus dan September 2023 terhadap 2.401 responden. Komposisi responden mayoritas adalah

perempuan (63.2%), lajang (56.9%), lulusan sarjana (34.7%) dan Gen Z (51,6%). Beberapa temuan penting riset ini adalah: (1) 24.2% responden percaya bahwa “krisis iklim adalah rekayasa buatan yang diciptakan oleh penguasa global” yang artinya mereka percaya pada teori konspirasi global, (2) sepertiga responden (21.5% setuju dan 11% sangat setuju) memiliki persepsi bahwa krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia yang melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya, (3) lebih dari 25% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa ilmuwan yang meneliti krisis iklim dikendalikan oleh kaum elit, (4) lebih dari separuh responden (63.5%) menjawab bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama mereka terkait topik krisis iklim, (5) lebih dari seperempat responden, 19.9% setuju dan 6.6% sangat setuju, dengan pernyataan bahwa upaya pemerintah mengurangi emisi bahan bakar bertentangan dengan cara hidup demokratis, (6) hampir separuh responden (47.1%) menyatakan bahwa mereka pernah mencari informasi terkait krisis iklim, namun dengan intensitas yang tidak terlalu sering, (7) hampir seluruh responden (98%) mengaku pernah menemukan konten bermuatan misinformasi krisis iklim di media sosial, (8) mayoritas responden, hingga nyaris mencapai 74% responden mengaku percaya diri dengan kemampuan mengidentifikasi misinformasi yang berkaitan dengan krisis iklim di media sosial, (9) lebih dari separuh responden (62.3%) menyatakan bahwa respon yang diberikan berhenti pada tahapan memverifikasi kebenaran informasi dan hanya sebagian kecil responden (20%) membuat konten kontra narasi untuk melawan misinformasi krisis iklim.

Pertanyaan kedua dijawab dengan melakukan analisis konten terhadap 123 konten misinformasi iklim (krisis iklim, pemanasan global, dan bencana alam) yang didapatkan dari empat laman website pengecekan fakta yakni: www.cekfakta.com, www.turnbackhoax.id, www.jalahoaks.jakarta.go.id, dan www.saberhoaks.jabarprov.go.id. Beberapa temuan analisis konten ini adalah: (1) terdapat tujuh jenis konten misinformasi krisis iklim yang ditemukan yakni: konten satir/parodi, koneksi yang salah, konten yang menyesatkan, konteks yang salah, konten impostor, konten yang dimanipulasi, dan konten palsu, (2) konten misinformasi iklim ternyata mempunyai tiga relevansi tema utama yakni agama, politik, dan climate-alarmism (alarmisme iklim), (3) Konten misinformasi seringkali mencatut nama tokoh atau sumber otoritas terkait dengan isu yang beredar tentang informasi palsu tersebut, (4) Keempat laman cek fakta yang diteliti tidak banyak menemukan misinformasi iklim jika dibandingkan dengan isu lain. Meskipun demikian, misinformasi krisis iklim seringkali berhubungan dengan misinformasi politik, (5) literasi dan kemampuan berpikir kritis penting untuk mencegah persebaran misinformasi iklim.

Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang sifatnya akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian mengenai pemetaan kebijakan pencegahan dan penanganan misinformasi lingkungan yang tak hanya meliputi misinformasi krisis iklim, namun juga misinformasi mengenai iklim secara umum, kebencanaan, maupun pemanasan global. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pencegahan dan penanganan misinformasi

krisis iklim yang melibatkan beragam pemangku kepentingan yakni pemerintah, institusi pendidikan, beragam komunitas terkait (Lingkungan Hidup, Cek Fakta, Literasi Digital, dan komunitas lain yang relevan), tokoh agama dan masyarakat, social influencer, dan pengguna internet. Beragam program yang bisa dilakukan untuk pencegahan misinformasi krisis iklim antara lain adalah cek fakta, media monitoring, penyediaan informasi krisis iklim yang memadai, penelitian, dan literasi. Sedangkan beragam program penanganan antara lain adalah mekanisme penyediaan laporan misinformasi krisis iklim maupun pembentukan satuan tugas (satgas) kolaboratif penanganan misinformasi krisis iklim. Program-program bisa dilakukan masing-masing pemangku kepentingan maupun secara kolaboratif.

Kata kunci: Misinformasi, Krisis iklim, Survei, Analisis konten



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR	8
1. PENDAHULUAN	9
2. MEMAHAMI MISINFORMASI KRISIS IKLIM: TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Misinformasi dan Penyangkalan: Penarasan Krisis Iklim dan Informasi di Indonesia	11
2.2. Strategi Komunikasi Penentang Krisis Iklim: Implikasi terhadap Pemahaman Publik di Indonesia	13
2.3. Nuansa Penyangkalan Krisis Iklim dan Misinformasi: Pentingnya Menelusuri Bias Konfirmasi, Pola Media Sosial, dan Keyakinan di Indonesia	16
3. SURVEI PENGGUNA INTERNET DAN MISINFORMASI KRISIS IKLIM DI INDONESIA.....	19
3.1. Metode	19
3.2. Profil Responden	20
3.2.1. Jenis Kelamin	20
3.2.2. Jenjang Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan.....	21
3.2.3. Usia	21
3.2.4. Jenis Pekerjaan dan Pendapatan.....	22
3.2.5. Status Pernikahan Responden	23
3.3. Limitasi Penelitian.....	24
3.4. Pemahaman dan Kesadaran Responden terhadap Krisis Iklim	24
3.5. Pola Konsumsi Informasi Krisis Iklim Responden	29
3.6. Kemampuan Literasi Digital Responden dalam Mengidentifikasi Misinformasi dan Merespon terhadap Misinformasi Krisis Iklim	31
4. ANALISIS KONTEN: PERSEBARAN MISINFORMASI KRISIS IKLIM	33
4.1. Sumber Data	33
4.2. Metode dan Limitasi.....	34
4.3. Tipe dan Kategori Misinformasi	37

4.3.1 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Satir atau Parodi	38
4.3.2 Misinformasi Krisis Iklim berupa Koneksi yang Salah	40
4.3.3 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten yang Menyesatkan	41
4.3.4 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konteks yang Salah	44
4.3.5 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Impostor	45
4.3.6. Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten yang Dimanipulasi	46
4.3.7. Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Palsu	48
4.4. Relevansi Tema	50
4.4.1. Konten terkait Isu Politik	52
4.4.2. Konten terkait Isu Keagamaan	55
4.4.3. <i>Climate-alarmism</i>	58
5. PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Usia Responden Berdasarkan Kategori (N=2.401)	22
Tabel 2 Tabel Presentase Responden yang Salah Menjawab Pertanyaan tentang Pengetahuan Umum terkait Krisis Iklim (N=2.401)	26
Tabel 3 Tabel Uji <i>Crosstab</i> Responden dengan Jawaban Salah untuk Pertanyaan No 1 dan No 2 (N=2.401)	26
Tabel 4 Tanggapan Responden terhadap Krisis Iklim (N=2.401).....	27
Tabel 5 Identifikasi Kata Kunci dan Jumlah Konten Misinformasi Iklim.....	35
Tabel 6 Konten Misinformasi Duplikasi dan Laman Web Pengecekan Fakta.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Misinformasi Bencana Alam	16
Gambar 2 Gender Responden (N=2.401)	20
Gambar 3 Tingkat Edukasi Responden (N=2.401)	21
Gambar 4 Pendapatan Responden (N=2.401)	23
Gambar 5 Status Pernikahan Responden (N=2.401)	23
Gambar 6 Sumber Informasi Utama Responden (N=2.401)	29
Gambar 7 Media Sosial yang Digunakan oleh Responden (N=2.401)	30
Gambar 8 Responden Mencari Informasi Krisis Iklim (N=2.401)	30
Gambar 9 Responden Menemukan Misinformasi di Media Sosial (N=2.401)	31
Gambar 10 Tindakan yang dilakukan responden saat menemukan informasi baru di media sosial yang terindikasi misinformasi (N= 2.401)	31
Gambar 11 Saya memiliki kemampuan dalam mengenali misinformasi dan disinformasi terkait krisis iklim di media sosial (N=2.401)	32
Gambar 12 Sumber Konten Misinformasi	37
Gambar 13 Tujuh Jenis Mis- dan Dis-Informasi	37
Gambar 14 Jumlah Konten terkait Misinformasi Iklim berdasarkan Kategori Misinformasi	38
Gambar 15 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Satir atau Parodi.....	39
Gambar 16 Grafik Misinformasi Tren Pendinginan Global	40
Gambar 17 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten yang Menyesatkan.....	42
Gambar 18 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konteks yang Salah.....	44
Gambar 19 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Impostor	46
Gambar 20 "Hillary Clinton: Saatnya Melarang Uang Kartal Untuk Melawan Krisis Iklim"	47
Gambar 21 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Palsu.....	49
Gambar 22 Jumlah Konten terkait Misinformasi Iklim berdasarkan Relevansi Tema Misinformasi.....	51
Gambar 23 Contoh 1: "Why the Globalist Fools Us with the Climate Change Narrative?"	53
Gambar 24 Contoh 2: "Banjir Terbaru di Jakarta yang Terjadi di Era Kepemimpinan Pj Gubernur Heru"	54
Gambar 25 Contoh 1: "Banjir di Jakarta adalah Air Mata Malaikat yang Jatuh dari Langit - Para Malaikat tersebut tergerak oleh Sholat Berjamaah Para Alumni 212 di Monas"	56
Gambar 26 Contoh 2: "Narasi "Sebelum Banjir Miras Allah Dahului Dengan Banjir Bandang!"	57
Gambar 27 "Pulau Jawa Akan Tenggelam Akibat Pemanasan Global"	58

1. PENDAHULUAN

Misinformasi merupakan salah satu tantangan yang paling banyak ditemukan dalam perkembangan teknologi digital dewasa ini. Tema misinformasi yang ditemukan di ruang digital pun beragam: politik, personal, agama, hiburan, pendidikan, bisnis, pangan, keuangan, pariwisata, olahraga dan lingkungan (Kurnia dkk, 2020). Beragam tema misinformasi serta kemampuan masyarakat untuk menavigasinya penting untuk dipetakan karena dampaknya yang bisa merugikan masyarakat yang rentan terhadap misinformasi dikarenakan kemampuan literasi digital mereka yang terbatas. Misinformasi terkait pandemi COVID-19, misalnya, menjadi misinformasi yang paling berdampak dan paling berbahaya di berbagai belahan dunia (Posetti & Bontcheva, 2020; Kurnia, Nurhajati & Astuti, 2020).

Tidak seperti jenis misinformasi lainnya, misinformasi terkait lingkungan terutama terkait krisis iklim jarang diteliti di Indonesia. Padahal, berbeda dengan misinformasi lainnya, misinformasi terkait krisis iklim sangat penting untuk dipetakan sebagai landasan gerakan akar rumput maupun upaya pemerintah untuk menangani krisis iklim. Apalagi Indonesia mempunyai peran yang penting dalam keberlangsungan lingkungan global karena posisinya sebagai hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia (Maulana dkk, 2019) dan mencakup 10% tutupan hutan global, serta merupakan rumah bagi 12% mamalia dunia (Setiawan, 2022).

Laporan penelitian berjudul “Menangkal Misinformasi Krisis Iklim di Indonesia” ini ditulis berdasarkan penelitian berjudul sama untuk melakukan investigasi terhadap persepsi pengguna internet di Indonesia terkait misinformasi krisis iklim maupun lingkungan hidup secara umum. Untuk melengkapi riset pengguna tersebut, analisis konten terhadap konten misinformasi yang diverifikasi faktanya oleh beragam program cek fakta di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena keprihatinan akan persebaran misinformasi yang terkait dengan lingkungan hidup terutama mengenai krisis iklim semakin banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Salah satu keprihatinan tersebut dimunculkan dalam acara The UN Climate Change Conference in Glasgow (COP26) yang diselenggarakan tahun 2021 (Culliford, 2021). Keprihatinan lain juga disampaikan dalam laporan Avaaz (2020) mengenai misinformasi krisis iklim yang banyak disebarkan melalui YouTube yang bahkan ditengarai melibatkan berbagai perusahaan besar di dunia. Avaaz adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang aktivisme global termasuk untuk isu krisis iklim.

Keprihatinan yang sama muncul di Indonesia karena tren persebaran misinformasi iklim di Indonesia juga semakin meningkat. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan jumlah *climate-change deniers* atau penyangkal krisis iklim tertinggi di dunia yakni sebesar 18% (Renaldi, 2019). Beragam konten misinformasi lingkungan hidup termasuk krisis iklim disebarkan di Indonesia melalui berbagai platform media sosial termasuk beragam akun para *social influencer* ternama yang mempunyai banyak *follower* atau pengikut.

Persoalannya, misinformasi krisis iklim sebagaimana dicontohkan di atas bisa saja menyesatkan pengguna internet Indonesia yang mayoritas masih mempunyai indeks literasi digital yang cenderung rendah (Harsono, 2022). Oleh karena itu, penanganan misinformasi krisis iklim di Indonesia penting untuk dilakukan sebelum dampaknya sangat mengganggu sebagaimana misinformasi politik maupun misinformasi pandemi COVID-19.

Untuk menyediakan pemetaan isu terkait misinformasi krisis iklim di Indonesia, penelitian ini menjawab dua pertanyaan penting. *Pertama*, bagaimana pemahaman, pola konsumsi dan kemampuan literasi digital pengguna internet Indonesia terkait misinformasi krisis iklim? *Kedua*, bagaimana ragam misinformasi krisis iklim yang ditemukan dan diverifikasi oleh beragam sumber cek fakta terpercaya di Indonesia? Kedua pertanyaan penting ini dijawab secara mendetail di bagian ketiga dan keempat laporan ini. Penelitian ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka terkait misinformasi krisis iklim di Indonesia di bagian kedua dan penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi bagian kelima atau terakhir dari laporan ini.

2. MEMAHAMI MISINFORMASI KRISIS IKLIM: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mendiskusikan tinjauan pustaka mengenai misinformasi krisis iklim dan penyangkalannya di Indonesia maupun konteks dunia. Temuan utama dari tinjauan pustaka ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, misinformasi krisis iklim membuat orang ragu atau semakin ragu terhadap konsensus krisis iklim. *Kedua*, misinformasi krisis iklim membuat orang tidak percaya atau ragu terhadap sains yang mempelajari krisis iklim. Akibatnya, misinformasi krisis iklim memiliki peran langsung dalam menopang krisis iklim dan menghambat aksi atau kebijakan krisis iklim. Maka dari itu, tinjauan pustaka ini memiliki tujuan untuk memberikan konteks lebih dalam mengenai misinformasi krisis iklim di Indonesia yang terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas konteks misinformasi krisis iklim yang kerap terjadi di Indonesia. Bagian kedua membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh para penentang krisis iklim dan pengaruhnya terhadap pemahaman publik terkait krisis iklim. Bagian terakhir membahas nuansa-nuansa terkait diskursus misinformasi krisis iklim.

2.1. Misinformasi dan Penyangkalan: Penarasian Krisis Iklim dan Informasi di Indonesia

Krisis iklim, salah satu isu paling mendesak di abad ke-21, telah menjadi subjek perdebatan dan tinjauan yang meluas. Namun, walau sebagian besar komunitas ilmiah telah sepakat untuk mengaitkan naiknya rata-rata suhu dunia dengan aktivitas manusia, Survei YouGov (2019)—lembaga riset dan analisis data—mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: sejumlah besar masyarakat Indonesia tetap skeptis, bahkan menolak konsensus ini. Alasan di balik skeptisisme ini bervariasi. Misalnya, rendahnya literasi ilmiah, kesenjangan pendidikan, keyakinan dan pandangan dunia, dan misinformasi. Dalam komunikasi ilmiah di dunia, peran dan dampak misinformasi telah ditinjau dalam berbagai ruang lingkup, misalnya demokrasi dan represi negara. Namun, penyelidikan lebih mendalam terhadap dampak misinformasi terhadap penyangkalan krisis iklim, terutama di Indonesia, masih absen. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelusuri pola konsumsi informasi dan penggunaan media sosial di Indonesia.

Pada 2019, YouGov menerbitkan laporan dengan data yang menunjukkan bahwa, kemungkinan besar, masyarakat Indonesia adalah penyangkal krisis iklim terbanyak di dunia (YouGov, 2019). Disinyalir bahwa 18% dari masyarakat Indonesia tidak percaya manusia bertanggung jawab atas krisis iklim—angka tertinggi dibandingkan negara lain

yang disurvei. Pada 2020, angka tersebut tetap sama (YouGov, 2020). Pada 2021, ketika diberikan pertanyaan, “ide pemanasan global yang disebabkan oleh manusia adalah sebuah kebohongan yang diciptakan untuk menipu orang, benar atau salah?” 22% dari masyarakat Indonesia menjawab mungkin benar atau pasti benar (YouGov, 2021). Laporan tersebut kemudian disadur oleh beberapa media prominen di Indonesia. Liputan KOMPAS menyoroti rendahnya literasi ilmiah sebagai komponen utama mengapa satu dari lima orang Indonesia tidak percaya bahwa krisis iklim bersifat antropogenik. KOMPAS mengutip Sonny Mumbana, peneliti Research Center for Climate Change Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mungkin tidak menyadari bagaimana kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan oleh krisis iklim (Arif, 2019). Demikian pula Yuyun Harmono, manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam wawancara dengan VICE berpendapat bahwa penyangkalan krisis iklim disebabkan oleh “kurangnya pendidikan tentang isu lingkungan di sekolah” (Renaldi, 2019). Sementara itu, menurut Remotivi—pusat studi komunikasi dan kajian media—misinformasi menopang penyangkalan krisis iklim dan menghambat kebijakan (Handoko, 2021).

Cendekiawan di berbagai disiplin ilmu telah menguraikan bagaimana misinformasi bersinggungan dengan, antara lain, demokrasi (misalnya, Alcott dan Gentzkow, 2017; Hunter, 2023), represi negara (lihat Sombatpoonsiri dan Luong, 2022), dan, tentu saja, krisis iklim (lihat Treen et al., 2020). Namun, perlu kecermatan dalam menggunakan konsep misinformasi. Misinformasi mendapat perhatian yang—sepatutnya—besar. Tetapi atensi tersebut juga bisa disebabkan oleh kepanikan moral, prasangka, dan ideologi alih-alih data. Altay dkk. (2023) bersikeras bahwa manusia itu, sebenarnya, tidak mudah dipengaruhi oleh misinformasi, pengguna Internet lebih banyak ‘mengonsumsi’ berita faktual, dan Internet tidak dipenuhi oleh misinformasi. Menurut Farkas dan Schou (2018), berita bohong telah menjadi *floating signifier* atau tanda yang mengambang. Dalam kata lain, mengatributkan label berita palsu pada sebuah informasi tidak hanya bergantung pada kebenaran informasi tersebut, tetapi juga pada karena adanya dorongan politis yang bertujuan untuk menawarkan dan memajukan sebuah tatanan tertentu. Terlepas dari faktor struktural, tidak bulatnya konsep misinformasi merupakan salah satu bagian integral dari digunakannya “berita palsu” sebagai senjata oleh pemerintahan otokratik (Sombatpoonsiri dan Luong, 2022). Pandangan peneliti tentang misinformasi mengacu kepada penelitian Altay dkk. (2023) yang menyarankan bahwa studi tentang misinformasi harus mempertimbangkan praktik konsumsi informasi manusia dan bagaimana informasi “benar” dapat dipelintir untuk menyampaikan narasi yang

menyesatkan. Saran mereka sejalan dengan literatur yang ada tentang misinformasi terkait krisis iklim dan penyangkalannya.

Peneliti menggunakan istilah “krisis iklim” alih-alih “perubahan iklim” untuk menekankan sifat mendesak dan serius dari naiknya suhu rata-rata global dan pola cuaca yang berubah. Peneliti mengakui dan mendukung konsensus bahwa aktivitas manusia sejak tahun 1800-an telah menyebabkan peningkatan signifikan suhu rata-rata global, yang secara grafis direpresentasikan oleh lonjakan “*hockey puck*” oleh studi Michael Mann (Oreskes dan Conway, 2011). Sejumlah aktivitas manusia, mulai dari awal kolonialisme, revolusi industri, hingga kapitalisme neoliberal saat ini, telah memperparah krisis iklim (lihat Burke et al., 2016; Chandler et al., 2017; Fishel et al., 2017). Dampak dari krisis iklim sangat serius, meluas, dan membelenggu: naiknya permukaan laut, mencairnya katup es, habitat yang hancur, spesies yang punah, dan pengungsian (Burke et al., 2016). Peneliti memilih menggunakan istilah “krisis iklim” alih-alih “pemanasan global” atau “perubahan iklim” karena dua alasan. Pertama, walau istilah “perubahan iklim” mungkin lebih dikenal oleh khalayak umum, penting untuk menggunakan istilah “krisis iklim” dengan tujuan menekankan urgensi permasalahan. Dalam bagian survei, peneliti menggunakan istilah ini untuk mengkomunikasikan fenomena dan bukti ilmiahnya. Kedua, “krisis iklim” mencakup lebih dari sekadar variasi suhu. Namun, menandakan krisis dan perubahan yang besar, cepat, serta merugikan yang disebabkan oleh tindakan manusia (Friedman, 2010; Carrington, 2019). Dengan mengadopsi istilah “krisis iklim”, peneliti bertujuan untuk menegaskan upaya penting dan peringatan dari ilmuwan, aktivis, jurnalis, dan semua orang yang khawatir terhadap ancaman global yang mendesak dan berkelanjutan ini.

Farmer dan Cook (2013) menulis dengan nada jenaka bahwa “penyangkal krisis iklim” itu tidak ada. Mereka dengan tepat menilai bahwa kebanyakan “penyangkal iklim” tidak menyatakan bahwa iklim tidak berubah. Mereka percaya iklim berubah. Namun, “penyangkal iklim” bersikeras bahwa aktivitas manusia memiliki sedikit atau bahkan tidak ada efek terhadap naiknya rata-rata suhu global. Selain itu, “penyangkal iklim” juga memandang perubahan suhu dan perubahan pola cuaca sebagai bagian dari siklus alami bumi. Konsensus ilmiah bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama krisis iklimlah yang disangkal.

2.2. Strategi Komunikasi Penentang Krisis Iklim: Implikasi terhadap Pemahaman Publik di Indonesia

Isu krisis iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang paling mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Meski ada konsensus ilmiah bahwa aktivitas manusia

merupakan penyebab utama krisis iklim, terdapat sekelompok kecil namun vokal yang terus menentang dan menyangkalnya. Mereka acap kali disebut “*climate crisis contrarian*” atau “penentang krisis iklim”. Penentang krisis iklim merujuk kepada individu dan/atau kelompok yang mencoba untuk membantah konsensus iklim dan menyebarkan misinformasi tentang penyebab dan konsekuensi krisis iklim.

Untuk lebih memahami bahasa dan taktik yang digunakan oleh para penentang krisis iklim, sebuah penelitian telah menggunakan teknik bantu komputer untuk menganalisis klaim dan argumen para penentang krisis iklim. Coan dkk. (2021) menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan dan menganalisis klaim penentang yang disampaikan dalam debat publik dan media. Studi tersebut menemukan bahwa algoritma tersebut dapat mengklasifikasikan klaim penentang dengan tingkat akurasi tinggi dan mengidentifikasi beberapa pola dan tema dalam klaim tersebut. Klaim tersebut termasuk klaim yang meremehkan risiko krisis iklim, menolak konsensus ilmiah, dan fokus pada penyebab alami variasi iklim. Temuan Coan dkk. (2021) menyarankan bahwa para penentang krisis iklim menggunakan berbagai strategi retorika untuk melemahkan konsensus ilmiah tentang krisis iklim dan strategi tersebut mungkin efektif dalam membentuk opini publik dan kebijakan. Coan dkk. (2021) berpendapat bahwa pendekatan mereka dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang isu ini dan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk melawan misinformasi tentang perubahan iklim. Mereka juga menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami faktor-faktor sosial dan politik yang menyebabkan keteguhan penentangan terhadap perubahan iklim, serta untuk mengembangkan intervensi yang lebih terarah dan efektif untuk melawan fenomena ini. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya menggunakan pendekatan inovatif dan lintas disiplin untuk mengatasi tantangan global kompleks dan mendesak seperti perubahan iklim.

Coan dkk. (2021) menunjukkan lima klaim umum yang mendukung misinformasi krisis iklim. Peneliti menyajikan temuan peneliti dan hubungannya dengan kelima klaim tersebut. Temuan yang disajikan dalam laporan ini seharusnya dianggap sebagai gambaran naratif yang dominan di Indonesia dan tidak mencakup semua informasi yang tersedia. Pertama, pemanasan global tidak terjadi (*global warming is not happening*). Komunikasi sebelumnya tentang krisis iklim menggunakan istilah “pemanasan global” untuk menyampaikan kenaikan suhu di Bumi. Ketika ada rekaman suhu dingin, misinformasi menyusul bahwa “pemanasan global tidak terjadi” (Hasyim dan Siswadi, 2018). Kedua, gas rumah kaca manusia tidak menyebabkan pemanasan global (*human greenhouse gasses are not causing global warming*). Sebuah unggahan populer di

platform papan pesan yang banyak digunakan, Kaskus, menyarankan bahwa aliran CO₂ saat ini bukan disebabkan oleh aktivitas antropogenik (Salkrye, 2018). Sebaliknya, pengguna tersebut menyatakan bahwa hal itu bagian dari siklus alam bumi. Ketiga, dampak iklim tidak buruk (*climate impacts are not bad*). Ada kepercayaan bahwa bencana dan pengungsian yang diinduksi oleh krisis iklim terbatas secara spasial (Communication for Change, 2021). Keempat, solusi iklim tidak akan berhasil (*climate solutions won't work*). Bukti menunjukkan bahwa narasi ini signifikan karena orang Indonesia meragukan kapasitas perwakilan politik dan lembaga mereka. Klaim ini diperkuat oleh upaya pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasikan pembangkit listrik batu bara sebagai energi terbarukan (Folia, 2019). Kelima, gerakan iklim dan ilmu iklim tidak dapat diandalkan (*climate movement and climate science are unreliable*). Banyak narasi penentang iklim memiliki nuansa konspiratif. Sebagai contoh, kepercayaan bahwa krisis iklim adalah bagian dari agenda globalis adalah untuk menyebarkan ketakutan dan mengendalikan orang.

Prevalensi misinformasi dan disinformasi tentang krisis iklim di internet menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa misinformasi iklim di Facebook "luar biasa" dan "mengalami peningkatan yang cukup signifikan". Studi tersebut menganalisis 195 halaman yang dikenal menyebarkan misinformasi tentang krisis iklim menggunakan alat analisis Facebook, CrowdTangle. Dari itu, 41 dianggap sebagai halaman "single issue". Dengan nama seperti "Climate Crisis is Natural", "Climate Crisis is Crap", dan "Climate Realism", kelompok-kelompok ini terutama membagikan meme yang membantah keberadaan krisis iklim dan mencemooh politisi yang mencoba mengatasi melalui legislasi (Buchan, 2021). Di ranah internet Indonesia, bentuk yang sama dari misinformasi dan disinformasi tentang krisis iklim sering terjadi. Terutama, pandangan dan informasi ini menyebar seperti api di media sosial, seperti X/Twitter, dan aplikasi pesan, seperti WhatsApp (Kurnia et al., 2020).

Peneliti menemukan bahwa ada banyak narasi penentang yang digunakan untuk menggantikan misinformasi yang merajalela mengenai krisis iklim dan menghubungkannya dengan keyakinan politik dan agama tertentu. Ini menjadi masalah khususnya bagi Indonesia, sebuah negara yang dikenal sebagai negara mayoritas Muslim; kelompok-kelompok yang terpinggirkan cenderung berada dalam posisi kekuatan yang tidak menguntungkan. Minoritas dan 'pelanggar' di mata mayoritas Muslim cenderung digambarkan sebagai kambing hitam untuk banyak 'ketidaknyamanan' yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, wacana bencana alam cenderung mengikuti narasi yang menggambarkan kelompok marjinal dengan nada negatif yang menghubungkannya sebagai penyebab banyak bencana alam. Dalam

tweet viral yang diposting oleh @tubirfess terlampir sebuah gambar spanduk yang menggambarkan misinformasi tentang bencana alam dan menghubungkannya dengan komunitas *queer* (Garjito dan Mulyono, 2020). Dalam gambar tersebut, akronim LGBT digunakan untuk mempersingkat nama bencana alam dalam bahasa Indonesia (Longsor, Gempa, Banjir, Tsunami), menyebarkan korelasi antara komunitas *queer* dan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Contoh seperti ini menggambarkan bagaimana kelompok terpinggirkan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan cenderung menjadi korban narasi penentang mengenai krisis iklim. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa krisis iklim dan bencana alam masih sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang dapat disebabkan oleh manusia, bukan oleh sekelompok orang berdasarkan perbedaan ideologi dan keyakinan agama mereka.

Gambar 1 Contoh Misinformasi Bencana Alam



Sumber gambar: X/Twitter

2.3. Nuansa Penyangkalan Krisis Iklim dan Misinformasi: Pentingnya Menelusuri Bias Konfirmasi, Pola Media Sosial, dan Keyakinan di Indonesia

Seperti yang diargumentasikan oleh Oreskes dan Conway (2011), misinformasi tentang krisis iklim menyerupai bagaimana pelaku industri pernah membujuk ilmuwan untuk merekayasa keraguan terhadap dampak tembakau dan rokok. Dampak utama misinformasi tentang krisis iklim adalah menanamkan keraguan dan merongrong kebijakan iklim. Individu yang tersesat atau disesatkan, bersama gerakan penentang krisis iklim, mengaburkan sains iklim dengan tujuan melanggengkan aktivitas ekonomi yang

dengan jelas mencancam biosfer (Franta, 2022). Menurut Boussalis dan Coan (2018), misinformasi tentang krisis iklim merupakan komponen signifikan dalam menyebabkan ketidaktindakan politik. Para penyangkal iklim memilah bukti dan memanfaatkan keyakinan orang untuk membuat mereka tidak percaya bahwa tidak ada konsensus di kalangan ilmuwan dan bahwa perjanjian internasional untuk mengatasi krisis iklim merupakan alat politik untuk mengendalikan mereka (Meijers et al., 2023; Allgaier, 2019). Misinformasi tentang krisis iklim juga menciptakan "kabut" yang mengaburkan pengalaman langsung orang terhadap krisis iklim serta mencoba menjauhkan mereka dari ilmu iklim (Beggley et al., 2007). Misalnya, banyak orang Indonesia telah mengalami kebakaran hutan, kekeringan, gelombang panas, dan banjir. Namun, mereka tidak mengaitkan fenomena ini dengan krisis iklim dan tidak menganggap krisis iklim sebagai masalah yang mendesak (Communication for Change, 2021). Selain itu, orang Indonesia juga tidak menganggap pemerintah atau lembaga internasional mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini.

Menurut Uscinski (2017) dari berbagai faktor, perilaku partisan merupakan komponen yang paling konsisten untuk menjelaskan penyangkalan krisis iklim. Dalam penelitiannya di ruang lingkup warga Amerika Serikat, simpatisan Partai Demokrat lebih menerima konsensus krisis iklim, sementara pendukung Partai Republik menolaknya—tentunya elit partai, dari segi perkataan dan kebijakannya di parlemen berpengaruh secara signifikan terhadap polarisasi ini. Uscinski (2017) juga bertujuan untuk menguraikan bagaimana kebiasaan orang untuk menerima konspirasi memengaruhi kemungkinan mereka menyangkal krisis iklim. Menurutnya, walau pemikiran konspirasi cukup berpengaruh, lebih berpengaruh dari yang sebelumnya diperkirakan, tetapi variabel tersebut tergantung pada identitas partisan. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk pemahaman persinggungan antara penyangkalan krisis iklim dan konspirasi.

Mengatasi misinformasi tentang krisis iklim bukan hal yang sederhana. Cook dkk. (2015) menunjukkan bagaimana menyajikan informasi yang benar kepada penyangkal krisis iklim tidak membuat mereka berubah pikiran. Sebaliknya, beberapa penyangkal iklim justru semakin yakin terhadap kepercayaan keliru tentang krisis iklim. Benegal dan Scruggs (2018) menyarankan untuk mempelajari terlebih dahulu keyakinan, pandangan dunia, dan identitas penyangkal krisis iklim sebelum menyajikan informasi yang faktual. Demikian pula Kahan (2017) mendapati bahwa individu cenderung menolak informasi yang benar ketika informasi yang salah lebih resonan dengan kepercayaan personal mereka.

Meskipun sudah ada penelitian tentang misinformasi, penyangkalan, dan hubungannya dengan krisis iklim, masih terdapat kesenjangan dalam memahami nuansa

penyangkalan krisis iklim dan misinformasi di Indonesia—negara yang disinyalir memiliki paling banyak penyangkal krisis iklim. Selain itu, belum ada penelitian yang mencoba mengidentifikasi peran pola konsumsi konfirmasi dan rutinitas media sosial dalam penyangkalan krisis iklim. Oleh karena itu, penelitian peneliti bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang misinformasi krisis iklim, penyangkalan iklim, dan latar belakang serta pola penggunaan media sosial di Indonesia.

3. SURVEI PENGGUNA INTERNET DAN MISINFORMASI KRISIS IKLIM DI INDONESIA

Pada bab ini akan dipaparkan secara deskriptif temuan yang didapatkan dari survei daring yang telah dilakukan. Pelaksanaan survei daring ditujukan untuk mendapatkan data primer yang menggambarkan lanskap kesadaran publik seputar krisis iklim dan misinformasi terkait krisis iklim di Indonesia. Survei dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan di pekan kedua Agustus hingga pekan kedua September pada tahun 2023.

3.1. Metode

Responden survei adalah individu berusia 17 tahun hingga 69 tahun yang aktif beraktivitas digital di ruang digital Indonesia. Sebanyak 2.401 responden dengan berbagai latar belakang demografi berpartisipasi menjawab seluruh pertanyaan survei. Metode survei dilakukan secara daring dengan sampling non-probabilitas dengan tingkat margin kesalahan $\pm 5\%$ dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Untuk mengupayakan agar survei dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan beragam karakteristik demografi, survei ini disebarluaskan melalui berbagai kanal media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, X/Twitter, dan TikTok.

Pengambilan data kuantitatif ditujukan untuk melakukan observasi terhadap pemahaman, pandangan, dan persepsi masyarakat terhadap misinformasi krisis iklim di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini termasuk dalam bentuk kajian observatoris sehingga tiga variabel yang digunakan untuk melakukan kajian ada tiga variabel dependen yang setara. Adapun tiga variabel yang digunakan dalam kajian ini adalah:

- Pemahaman dan kesadaran responden terhadap krisis iklim
- Pola konsumsi informasi terkait krisis iklim
- Kemampuan literasi digital responden dalam mengidentifikasi dan merespon misinformasi

Sebelum survei benar-benar dilaksanakan, peneliti telah melakukan dua putaran *pretest* untuk menguji kelayakan kuesioner. Survei kemudian disebarluaskan dan responden dapat melakukan pengisian secara mandiri. Untuk memastikan kualitas survei, peneliti akan menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat sebagaimana yang disarankan oleh Evans dan Mathur (2018) untuk mengatasi potensi kekurangan dari survei daring. Salah satu langkah yang digunakan adalah membatasi kuesioner agar hanya dapat diisi sebanyak satu kali untuk satu alamat IP.

Sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, teknik analisis data yang digunakan untuk mengelola data-data kuantitatif survei adalah analisis deskriptif. Artinya, tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan terhadap data-data yang ada dan analisa data dilakukan dengan memaparkan gambaran deskriptif terhadap data-data yang didapatkan.

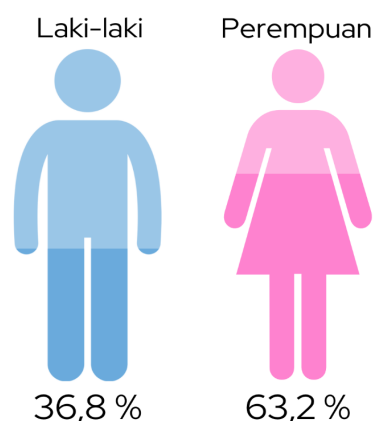
3.2. Profil Responden

Sub bab ini membahas tentang karakteristik demografi 2.401 responden yang berpartisipasi dalam survei. Karakter demografi yang ditinjau dalam survei ini antara lain adalah jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, usia, jenis pekerjaan, pendapatan, dan status pernikahan. Melalui pemaparan deskriptif demografi, harapannya tren, pola, dan hubungan yang mungkin ada antara karakteristik individu dengan respons yang diberikan dapat diidentifikasi. Dengan memahami demografi responden, penelitian ini dapat memberikan konteks yang lebih kaya dan mendalam dalam interpretasi hasil serta implikasinya pada konteks lebih luas.

3.2.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, diketahui bahwa 63.2% dari 2.401 responden adalah perempuan. Sedangkan itu, 36.8% responden adalah laki-laki. Menariknya, temuan ini bertolak belakang dengan data BPS yang menyatakan bahwa rasio pengguna internet laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (BPS, 2023). Perbedaan ini dapat disebabkan karena penerapan metode sampling non-probabilitas dan pelaksanaan survei yang diisi secara mandiri oleh responden sehingga jangkauan survei tidak dikontrol berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 2 Gender Responden (N=2.401)

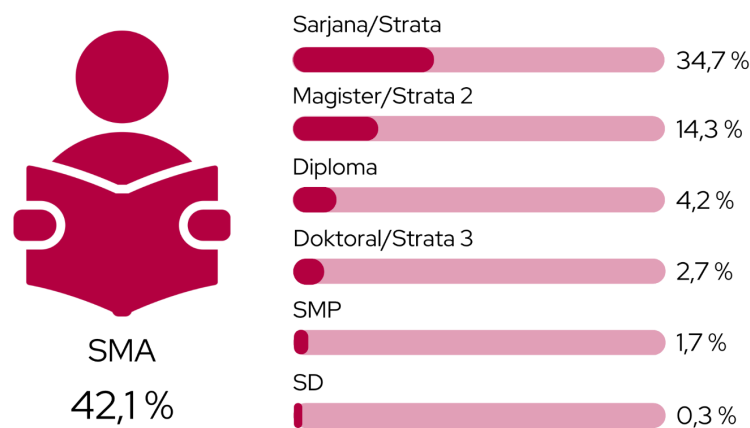


Sumber: Hasil olah data peneliti

3.2.2. Jenjang Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Terkait status pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden, 42.1% dari 2401 responden adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. 34.7% responden menyandang gelar sarjana sebagai gelar pendidikan tertinggi, dan 14.3% memiliki gelar master. Bila dibandingkan dengan data BPS, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada Maret 2023, diketahui bahwa tingkat pendidikan terbanyak di Indonesia secara berurutan adalah SMA/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SD/ sederajat (BPS, 2023).

Gambar 3 Tingkat Edukasi Responden (N=2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

3.2.3. Usia

Sedangkan itu, usia rata-rata responden adalah 29 tahun dengan mayoritas responden masuk dalam kategori Generasi Z (kelahiran 1997 hingga 2012) dan Generasi Millenial (kelahiran 1981 hingga 1996). Temuan ini selaras dengan data dari berbagai sumber seperti survei Penetrasi dan Perilaku Internet Indonesia 2023 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa individu dengan kelompok usia di dalam rentang Generasi Z dan Generasi Milenial memiliki sumbangsih yang dominan terhadap populasi pengguna internet di Indonesia. Sehingga, tidak mengejutkan bila responden survei ini didominasi oleh responden yang termasuk dalam kategori Generasi Z dan Generasi Milenial. Lebih lanjut, bila disandingkan dengan temuan karakteristik latar belakang pendidikan tertinggi responden, dapat disimpulkan bahwa temuan survei ini merefleksikan pandangan dan pengalaman responden yang pada umumnya masuk dalam

kategori generasi Z dan Milenial yang telah menamatkan pendidikan dasar 12 tahun.

Tabel 1 Usia Responden Berdasarkan Kategori (N=2.401)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Gen Z	1239	51.6	51.6	51.6
	Gen Milenial	934	38.9	38.9	90.5
	Gen X	212	8.8	8.8	99.3
	Gen Boomer	16	.7	.7	100.0
	Total	2401	100.0	100.0	

Sumber: Hasil olah data peneliti

3.2.4. Jenis Pekerjaan dan Pendapatan

Responden yang berpartisipasi dalam survei memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam. Lebih dari sepertiga responden (35.1%) adalah mahasiswa/pelajar. Sedangkan itu, 15.2% responden adalah pegawai swasta dan 12.1% merupakan ibu/bapak rumah tangga. Terdapat 9.3% responden yang berprofesi sebagai dosen/guru/tenaga pendidik, dan 7.7% responden yang merupakan pegawai negeri. Selaras dengan temuan ini, diketahui bahwa 30.4% responden menyatakan belum memiliki pendapatan. Sedangkan itu, sebanyak 31.5% mengaku telah memiliki pendapatan melebihi 3,5 juta rupiah per bulan, menunjukkan sebagian besar memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Selanjutnya, 12,1% berada dalam kisaran pendapatan 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah, sementara 10,6% mendapatkan antara 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah perbulan. Sebagai catatan, berdasarkan data BPS (2023 B), rata-rata pendapatan perbulan di Indonesia per 2023 adalah 3,18 juta rupiah. Artinya, dapat disimpulkan bahwa kurang lebih sepertiga responden survei memiliki pendapatan di atas rata-rata pendapatan bulanan nasional.

Gambar 4 Pendapatan Responden (N=2.401)

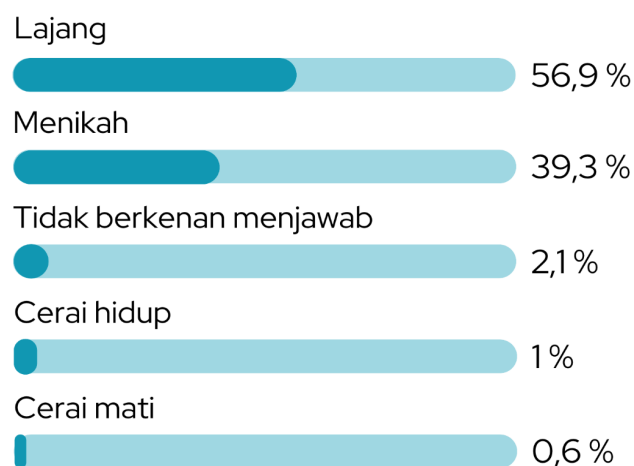


Sumber: Hasil olah data peneliti

3.2.5. Status Pernikahan

Terkait status pernikahan responden, 56.9% of responden berstatus lajang, 39.3% sudah menikah, dan sisanya memiliki status cerai hidup, cerai mati, atau menolak menjawab pertanyaan terkait status pernikahan. Temuan ini selaras dengan karakteristik usia dan jenis pekerjaan yang dominan di antara para responden.

Gambar 5 Status Pernikahan Responden (N=2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

3.3. Limitasi Penelitian

Berdasarkan pemaparan karakteristik demografi responden berdasarkan beberapa kelompok karakteristik yang beragam, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden survei ini adalah individu yang termasuk dalam generasi Z dan milenial. Sebagian besar responden merupakan lulusan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang memiliki akses ke pendidikan tinggi. Sedangkan itu, lebih dari 30% responden adalah pelajar/mahasiswa yang belum memiliki penghasilan. Namun demikian, 31.5% responden memiliki penghasilan di atas 3.5 juta dan 12.1% responden berpendapatan di antara rentang 2,5 hingga 3,5 juta rupiah perbulan. Artinya, kurang lebih sepertiga responden berpenghasilan lebih tinggi dari rata-rata pendapatan bulanan nasional.

Mempertimbangkan konteks karakteristik responden survei, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban survei akan menyiratkan tren, persepsi, dan pengalaman dari perspektif kelompok muda, berpendidikan, dan kelas menengah. Tren karakteristik responden survei sejatinya bukan suatu hal yang mengejutkan mengingat bahwa penetrasi internet terbesar terjadi di kelompok masyarakat dengan karakteristik demografi tersebut. Namun, karakteristik responden survei yang cenderung terkonsentrasi pada kelompok demografi yang hampir serupa dapat menjadi limitasi dari temuan survei secara keseluruhan. Kajian-kajian terkait selanjutnya perlu mempertimbangkan aplikasi metode *sampling* dan pengisian survei yang berbeda untuk mencapai keberagaman demografi responden demi mendapatkan hasil survei yang lebih representatif.

3.4. Pemahaman dan Kesadaran Responden terhadap Krisis Iklim

Mengacu pada *literature review*, terdapat dua set pernyataan yang ditujukan bagi responden untuk mendapat gambaran terkait pemahaman dan kesadaran responden terhadap krisis iklim. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dirumuskan dengan terinspirasi dari kajian yang telah dilakukan oleh YouGov (2021) dan Coan et al. (2021).

Set pernyataan pertama memuat 10 pernyataan biner yang ditujukan untuk memetakan pemahaman responden terhadap krisis iklim. Selain menyusun pernyataan berdasarkan kajian yang telah dilakukan, peneliti juga menambahkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan informasi faktual terkait krisis iklim di Indonesia. Secara rinci, set pernyataan pertama terdiri dari:

1. Krisis iklim merupakan konspirasi penguasa global untuk mempertahankan kekuasaannya
2. Pemanasan global tidak terjadi karena musim hujan tetap ada

3. Semua hewan dapat dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global
4. Pohon membutuhkan karbon dioksida untuk tumbuh dan berkembang
5. Indonesia menetapkan target energi bauran untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil
6. Saat ini energi Listrik di Indonesia paling banyak diproduksi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sumber energi utamanya adalah batu bara
7. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan badai tidak ada hubungannya dengan dampak krisis iklim
8. Krisis iklim mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna
9. Pemanasan global memang terjadi, namun penyebabnya bukan karena perilaku manusia melainkan karena siklus alam
10. Peningkatan suhu matahari menyebabkan suhu bumi memanas

Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar mendapatkan skor 2, sedangkan jawaban salah tidak mendapatkan skor sama sekali. Berdasarkan jawaban responden, diketahui bahwa rata-rata skor yang didapatkan oleh responden adalah 16.9. Artinya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah memiliki pemahaman dasar terkait krisis iklim yang baik. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut berdasarkan persentase jawaban per pertanyaan, ditemukan beberapa tren jawaban yang menarik. Pada pertanyaan nomor 1 yang berbunyi "Krisis iklim merupakan konspirasi penguasa global untuk mempertahankan kekuasaannya", terdapat 24.2% yang menjawab pernyataan tersebut adalah benar, padahal jawaban seharusnya adalah salah. Narasi krisis iklim adalah rekayasa buatan yang diciptakan oleh penguasa global adalah salah satu narasi misinformasi krisis iklim yang kerap ditemukan di ruang digital dan diusung oleh kelompok-kelompok yang membantah adanya krisis iklim. Terdapat pula 17.9% orang yang menjawab dengan salah untuk pertanyaan nomor 2 yang berbunyi "Pemanasan global tidak terjadi karena musim hujan tetap ada." Narasi ini juga kerap diusung oleh pengelak krisis iklim. Bila ditelaah lebih lanjut dengan *cross tab*, diketahui bahwa terdapat 238 responden atau hampir 10% responden yang menjawab dengan salah untuk kedua pertanyaan tersebut.

Tabel 2 Persentase Responden dalam Menjawab Pertanyaan tentang Pengetahuan Umum terkait Krisis Iklim (N=2.401)

No. Pertanyaan	Persentase Responden yang Menjawab dengan Benar	Persentase Responden yang Menjawab dengan Salah
1	75.8%	24.2%
2	82.1%	17.9%
3	86%	14%
4	82.9%	17.1%
5	91.8%	8.2%
6	88.4%	11.6%
7	87.4%	12.6%
8	99%	1%
9	87.7%	12.3%
10	68.8%	31.2%

Sumber: Hasil olah data peneliti

Tabel 3 Uji Crosstab Responden dengan Jawaban Salah untuk Pertanyaan No 1 dan No 2 (N=2.401)

Krisis iklim merupakan konspirasi... * Pemanasan global tidak terjadi...					
			Pemanasan global tidak terjadi karena musim hujan tetap ada		Total
			Jawaban Salah	Jawaban Benar	
Krisis iklim merupakan konspirasi penguasa global untuk mempertahankan kekuasaannya	Jawaban Salah	Count	238	344	582
		% within skor jawaban "Krisis iklim..."	40.9%	59.1%	100%
		% within skor jawaban "Pemanasan global..."	55.5%	17.4%	24.2%
		% of total	9.9%	14.3%	24.2%
	Jawaban	Count	191	1628	1819

	Benar	% within skor jawaban "Krisis iklim..."	10.5%	89.5%	100%
		% within skor jawaban "Pemanasan global..."	44.5%	82.6%	75.8%
		% of total	8%	67.8%	75.8%
Total		Count	429	1972	2401
		% within skor jawaban "Krisis iklim..."	17.9%	82.1%	100%
		% within skor jawaban "Pemanasan global..."	100%	100%	100%
		% of total	17.9%	82.1%	100%

Sumber: Hasil olah data peneliti

Sedangkan itu, set pernyataan kedua terdiri dari 10 pernyataan yang ditanggapi dengan jawaban dalam skala likert oleh responden. Set pernyataan ini ditujukan untuk memahami persepsi responden terhadap krisis iklim. Tanggapan responden terhadap 10 pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan Responden terhadap Krisis Iklim (N=2.401)

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju
1.	Informasi terkait dampak krisis iklim di media sosial berlebihan	27	47.3	18.5	7.2
2.	Saya memahami apa yang dimaksud dengan fenomena krisis iklim	1.1	5.4	55.7	37.8
3.	Iklim tidak pernah berubah dan apa yang dimaksud dengan fenomena krisis iklim tidak ada	67.8	23.5	5.4	3.3
4.	Saya meyakini krisis iklim terjadi akibat ulah manusia	3.7	6.9	41.8	47.6

5.	Krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia yang melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya	33.4	34.1	21.5	11
6.	Upaya pemerintah mengurangi emisi bahan bakar bertentangan dengan cara hidup demokratis	29.8	43.7	19.9	6.6
7.	Ilmuwan yang meneliti krisis iklim dikendalikan oleh kaum elit, Dimana hasil penelitian mereka direkayasa demi keuntungan kaum elit	34.2	39.2	18.6	8
8.	Iklim memang selalu berubah, sehingga pemanasan global merupakan fenomena alam dan bukan disebabkan oleh aktivitas manusia	38.4	41.1	13	7.5
9.	Krisis iklim tidak dapat dicegah atau dihentikan, oleh karenanya tidak ada gunanya mengambil tindakan	58.9	26.9	8.3	5.9
10.	Organisasi yang peduli dengan iklim dibiayai oleh orang asing agar mencegah Indonesia menjadi negara yang maju	43.7	38.7	12.1	5.5

Sumber: Hasil olah data peneliti

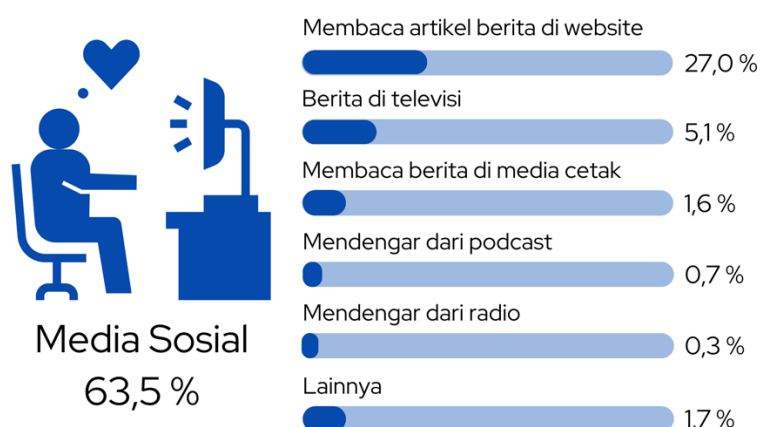
Terdapat beberapa simpulan menarik yang dapat ditarik dari temuan di atas. *Pertama*, sepertiga responden (21.5% setuju dan 11% sangat setuju) memiliki persepsi bahwa krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia yang melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya. Temuan ini menarik mengingat mengingat bahwa kerap kali religiusitas menjadi aspek yang dikaitkan dalam diskursus krisis iklim maupun fenomena alam lainnya (Garjito dan Mulyono, 2020; Jenkins et al, 2018; serta Barker dan Bearce, 2013). *Kedua*, yang menarik adalah lebih dari 25% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa ilmuwan yang meneliti krisis iklim dikendalikan oleh kaum elit, di mana hasil penelitian mereka direkayasa demi keuntungan kaum elit (18.6% setuju dan 8% sangat setuju). *Ketiga*, terdapat lebih dari 25% responden yang sepakat dengan pernyataan bahwa upaya pemerintah mengurangi emisi bahan bakar bertentangan dengan cara hidup demokratis (19.9% setuju dan 6.6% sangat setuju). Keberagaman

respon responden terhadap pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi beragam terkait krisis iklim dan narasi-narasi yang membersamainya.

3.5. Pola Konsumsi Informasi Krisis Iklim Responden

Berdasarkan data yang didapatkan, responden survei ini adalah pengguna aktif internet dengan waktu rata-rata penggunaan sebanyak 8 jam perhari. Temuan ini tidak jauh berbeda dengan data yang dirilis oleh We Are Social pada 2023 lalu yang menyatakan bahwa 7 jam 42 menit adalah rata-rata waktu yang digunakan penduduk Indonesia untuk mengakses internet setiap harinya. Kedua data ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia terlekat dengan internet. Ditelisik lebih jauh, 63.5% responden menjawab bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama mereka terkait topik krisis iklim, diikuti *platform* berita daring (27%) dan menonton liputan berita di TV (5.1%).

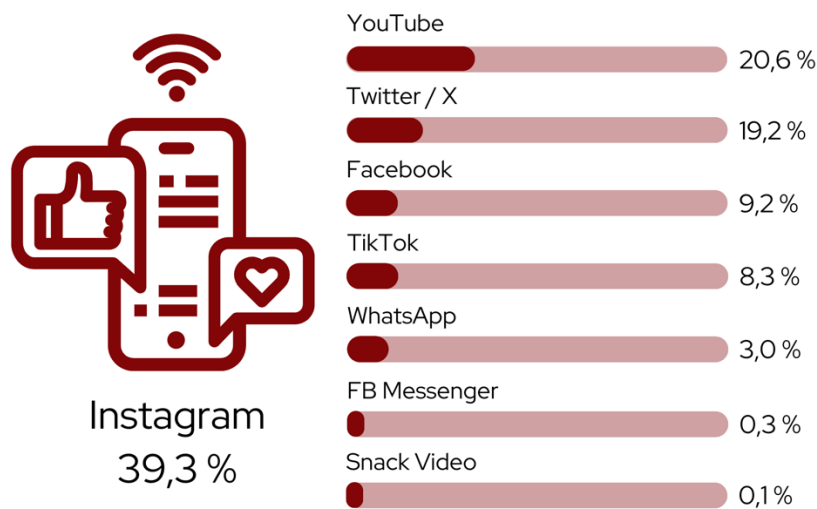
Gambar 6 Sumber Informasi Utama Responden (N=2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

Lebih lanjut, media sosial yang paling populer digunakan untuk mencari informasi terkait krisis iklim adalah Instagram dengan persentase jawaban sebesar 39.3% dari 2.401 responden. Sedangkan itu, media sosial terpopuler kedua adalah YouTube (20.6%) dan X/Twitter (19.2%).

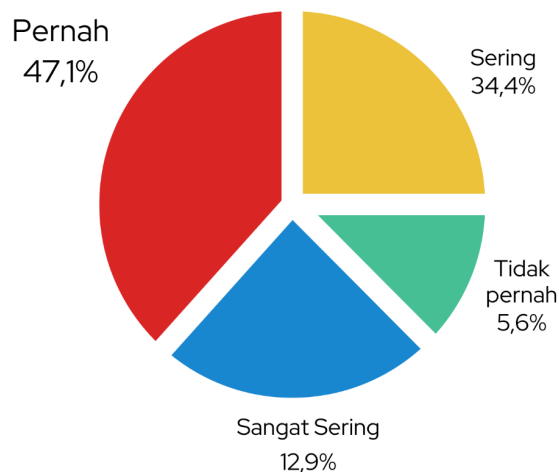
Gambar 7 Media Sosial yang Digunakan oleh Responden (N=2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

Masih terkait pola konsumsi informasi krisis iklim, survei ini menemukan bahwa mayoritas responden pernah dengan sengaja mencari informasi terkait krisis iklim. 47.1% menyatakan bahwa mereka pernah mencari informasi terkait krisis iklim, namun dengan intensitas yang tidak terlalu sering. Sedangkan itu, terdapat 34.4% responden yang sering mencari informasi dan 12.9% yang sangat sering mencari informasi terkait krisis iklim.

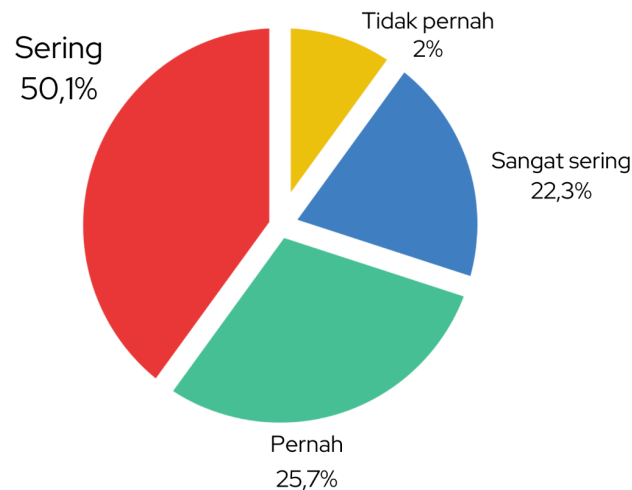
Gambar 8 Responden Mencari Informasi Krisis Iklim (N=2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

Menariknya, 98% responden mengaku pernah menemukan konten bermuatan misinformasi krisis iklim di media sosial. 50.1% menyatakan sering menemukan konten misinformasi. Bahkan, 22.3% megaku bahwa sering menemukan konten misinformasi iklim. Terdapat 25.7% mengaku pernah menemukan namun dengan frekuensi yang tidak sering.

Gambar 9 Responden Menemukan Misinformasi di Media Sosial (N=2.401)



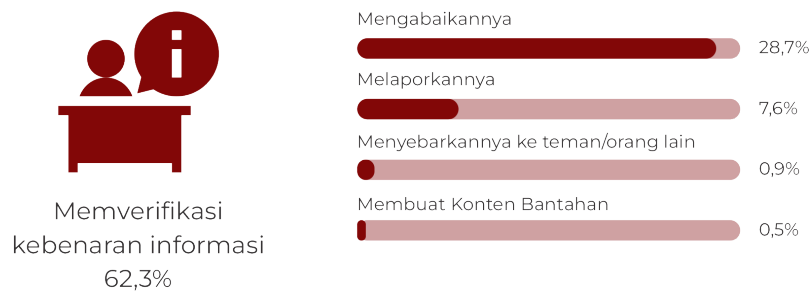
Sumber: Hasil olah data peneliti

Ketika kedua temuan ini disilangkan, 98.9% responden yang aktif mencari informasi terkait krisis iklim mengaku pernah menemukan konten bermuatan misinformasi tentang krisis iklim. Artinya, dapat disimpulkan bahwa pengalaman menemukan konten misinformasi krisis iklim di ruang digital Indonesia prevalen di antara responden.

3.6. Kemampuan Literasi Digital Responden dalam Mengidentifikasi Misinformasi dan Merespon terhadap Misinformasi Krisis Iklim

Survei ini menemukan bahwa mayoritas responden, hingga nyaris mencapai 74% responden mengaku percaya diri dengan kemampuan mengidentifikasi misinformasi yang berkaitan dengan krisis iklim di media sosial. Secara rinci, 59.7% dari responden menyatakan kepercayaan diri yang kuat, dan 24% lagi menunjukkan tingkat keyakinan yang sangat kuat. Temuan ini selaras dengan temuan yang telah dipaparkan di sub bab 3.3. terkait rata-rata skor responden dalam merespon 10 pernyataan terkait krisis iklim.

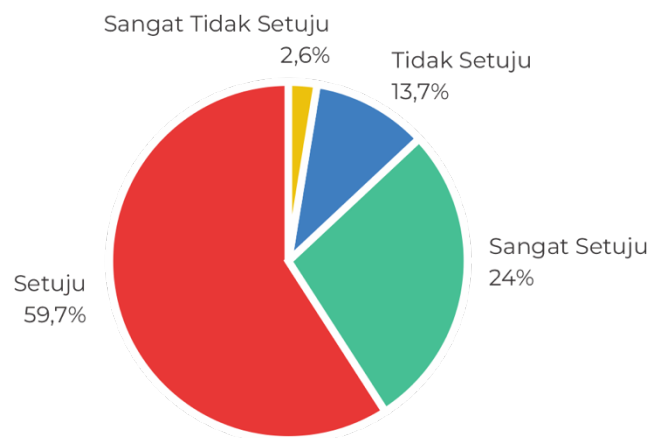
Gambar 10 Tindakan yang dilakukan responden saat menemukan informasi baru di media sosial yang terindikasi misinformasi (N= 2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

Saat digali lebih lanjut mengenai respon responden terhadap misinformasi, 62.3% menyatakan bahwa respon yang diberikan berhenti pada tahapan memverifikasi kebenaran informasi. Terdapat 28.7% responden yang memilih untuk mengabaikan konten tersebut. Menariknya, terdapat kurang lebih 8% responden yang tidak hanya berhenti di tahap verifikasi saja, namun juga melaporkan konten tersebut atau membuat konten tandingan untuk menyangkal misinformasi tersebut. Nampaknya responden cenderung mengambil langkah pasif dalam merespon misinformasi.

Gambar 11 Saya memiliki kemampuan dalam mengenali misinformasi dan disinformasi terkait krisis iklim di media sosial (N=2.401)



Sumber: Hasil olah data peneliti

Temuan ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Gurgun et al. (2024) yang menemukan bahwa 58.8% dari pengguna Facebook di United Kingdom yang disurvei menyatakan enggan untuk membuat konten kontra misinformasi. Upaya kontra misinformasi secara aktif perlu didorong di level individu untuk menekan laju misinformasi.

4. ANALISIS KONTEN: PERSEBARAN MISINFORMASI KRISIS IKLIM

Sebagai upaya untuk memahami bagaimana persebaran misinformasi iklim di ruang digital terjadi, maka penelusuran terhadap berbagai jenis konten internet dengan muatan terkait misinformasi mengenai iklim dilakukan. Analisis terhadap konten dilakukan dengan mempelajari jenis misinformasi yang terdapat dalam konten-konten yang dapat ditemukan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap kerangka teori yang ada. Dari hasil analisis tersebut akan ditemukan unsur-unsur kesamaan misinformasi yang beredar. Melalui pemahaman terkait misinformasi tersebut, diharapkan dapat membantu memahami karakteristik konten misinformasi serta mengantisipasi risiko penyebaran misinformasi yang ada.

4.1. Sumber Data

Di Indonesia, telah terdapat berbagai upaya untuk memerangi misinformasi iklim online. Inisiatif ini dilakukan oleh beberapa organisasi cek fakta berskala nasional maupun regional. Organisasi-organisasi ini secara aktif menyebarkan informasi terkait misinformasi baru yang mereka temukan dan menginformasikan faktanya kepada publik melalui berbagai kanal media sosial maupun laman web.

Data dari penelitian ini diolah berdasarkan data publik yang tersedia pada empat laman web organisasi yang terdiri dari organisasi berbasis masyarakat sipil seperti MAFINDO, serta inisiatif pemerintah seperti Jala Hoaks dan juga SaberHoaks. Keempatnya dilihat sebagai representasi lembaga cek fakta yang kredibel pada level nasional dan regional. Penting untuk diketahui bahwa jenis misinformasi yang tersedia di situs web ini juga mencakup beberapa misinformasi dari bahasa non-Bahasa Indonesia yang dibagikan di antara pengguna media sosial di Indonesia.

1. www.cekfakta.com

Laman web ini dikelola oleh MAFINDO (Masyarakat Antifitnah Indonesia), sebuah organisasi masyarakat sipil antihoaks. Ini dimulai sebagai organisasi akar rumput daring pada tahun 2015. Dalam menjalankan inisiatif ini, MAFINDO juga bekerja bersama ribuan relawan, jurnalis, dan juga didukung oleh pendanaan Google News Initiative.

2. www.turnbackhoax.id

Laman ini dikelola oleh MAFINDO (Masyarakat Antifitnah Indonesia- Masyarakat Anti-Pencemaran Nama Baik Indonesia), sebuah organisasi masyarakat sipil

antihoaks. Website tersebut berfungsi sebagai arsip web dari grup Facebook pengecekan fakta bernama "Forum Antifitnah, Hasut, dan Hoaks" (FAFHH), yang dikelola oleh MAFINDO, yang saat ini memiliki sekitar 98.300 anggota.

3. www.jalahoaks.jakarta.go.id

Laman ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk mengelola informasi publik yang positif dan produktif melalui penerbitan informasi, fakta, dan klarifikasi untuk melawan hoaks. Situs tersebut memuat berbagai laporan hoaks dan verifikasi informasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun situs ini dikelola oleh pemerintah Jakarta, situs ini tidak hanya diperuntukkan bagi hoaks dan disinformasi terkait Jakarta, melainkan informasi yang tersebar secara luas terhadap pengguna internet di Indonesia.

4. www.saberhoaks.jabarprov.go.id

Laman web ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui unit khusus Jabar Saber Hoaks di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Unit ini didirikan pada 7 Desember 2018 dengan tujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan pemikiran kritis masyarakat terhadap informasi palsu. Sama halnya dengan website sebelumnya, meski dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, laman tersebut memuat berbagai laporan pembongkaran hoaks dan verifikasi informasi yang tidak selalu berkaitan dengan permasalahan di Jawa Barat. Mereka juga menerbitkan laporan-laporan yang memverifikasi berbagai hoaks dan disinformasi.

4.2. Metode dan Limitasi

Studi analisis konten ini menggunakan data dan arsip dari empat situs (Cek Fakta, TurnbackHoax, Jalahoaks, dan Saberhoaks) untuk menemukan ragam artikel misinformasi iklim daring di Indonesia. Selain kredibilitas dari lembaga-lembaga tersebut, pertimbangan selanjutnya adalah kesulitan peneliti untuk mengakses postingan asli yang telah dibantah dan dilaporkan di media sosial karena postingan asli telah dihapus oleh platform—sebagai dampak dari laporan atas misinformasi yang dilakukan. Sementara itu, di situs-situs yang dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut, tangkapan layar dari postingan asli tersedia dan dapat diakses untuk publik. Situs-situs tersebut juga menyediakan beberapa data terkait misinformasi yang menyebar melalui jalur komunikasi yang lebih pribadi seperti grup Whatsapp. Namun, peneliti memahami bahwa mungkin ada keterbatasan jumlah informasi yang tersedia dari keempat situs tersebut dan terdapat beberapa duplikasi informasi satu sama lain. Berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan melalui keempat laman web tersebut, ditemukan

bahwa sebagian besar konten yang telah dibantah sebagian besar berasal dari media sosial dan blog berbasis teks, dan terdapat batasan pada platform yang lebih berbasis grafis atau visual seperti TikTok dan YouTube.

Penelitian ini menggunakan analisis konten (*Content Analysis* atau sering disebut dengan CA) sebagai metode analisis, yang dalam konteks ini, menggunakan teks dan gambar terdokumentasi yang tersedia dari sumber publik. Teks dan gambar terdokumentasi yang menjadi subjek analisis merupakan konten misinformasi krisis iklim serta artikel narasi pengecekan fakta yang dilakukan oleh tim pengecekan fakta pada masing-masing laman web. Pemeriksaan purposif dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian utama mengenai misinformasi krisis iklim di Indonesia—oleh karena itu, konten analisis ini menggunakan metode analisis berbasis masalah (Krippendorff, 2022). Dimulai dengan pertanyaan penelitian awal, peneliti mulai mencari teks yang relevan dan menentukan unit sampel. Berdasarkan sampel yang ditemukan, peneliti mengembangkan kategori pengkodean pada kata-kata kunci terkait isu krisis iklim.

Dalam studi ini, peneliti mengidentifikasi beberapa kata kunci yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan menetapkan topik terkait.

Tabel 5 Identifikasi Kata Kunci dan Jumlah Konten Misinformasi Iklim

Sub-Topik/Jumlah Konten	Kata Kunci	Jumlah Konten pada CekFakta	Jumlah Konten pada TurnbackHoax	Jumlah Konten pada Jalahoaks	Jumlah Konten pada Saberhoaks	Jumlah Konten
Krisis Iklim	"Iklim" (or) "Perubahan Iklim" (or) "Climate Change" (or) "Krisis Iklim"	13	10	7	1	31
Pemanasan Global	"Global Warming" (or) "Pemanasan Global"	5	8	1	2	18
Bencana Alam	"Banjir" (or) "Longsor" (or) "Gempa" (or) "Tsunami"	30	28	11	7	76
Jumlah Konten		48	46	19	10	123

Sumber: Hasil olah data peneliti

Terdapat tiga sub-topik yang diidentifikasi untuk membantu peneliti melihat isu krisis iklim dan misinformasi di Indonesia yakni krisis iklim, pemanasan global, dan bencana

alam. Ketiga sub-topik tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari payung utama mengenai topik “krisis iklim”. Pengkategorian dalam ketiga sub-topik tersebut digunakan untuk mempermudah pencarian kata kunci yang lebih spesifik yang berkaitan dengan isu-isu krisis iklim. Hal ini terutama dikarenakan istilah “krisis iklim” sendiri belum banyak digunakan dalam berbagai narasi. Oleh karenanya, digunakan tiga sub-topik turunan yakni “krisis iklim”, “pemanasan global”, dan “bencana alam”. Bencana alam sendiri dipilih sebagai salah satu subtopik dikarenakan keterkaitan antara isu-isu bencana alam dengan isu-isu iklim—baik sebagai dampak dari perubahan iklim, maupun bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia—yang seringkali merupakan implikasi dari sikap penyangkalan terhadap krisis iklim. Ketiga sub-topik ini kemudian dibagi menjadi beberapa kata kunci pencarian sebagaimana disebutkan di dalam tabel sebelumnya.

Terdapat kurang lebih 123 konten misinformasi iklim yang ditemukan. Artikel-artikel ini kemudian dikategorikan ke dalam “jenis misinformasi” dan juga “relevansi tema”. Pada “tipe dan kategori misinformasi” peneliti mengidentifikasi kategori misinformasi dengan mengacu kepada kategorisasi yang dilakukan oleh First Draft (2017). Sementara itu, kategori “relevansi tema” dikategorikan dengan menganalisis narasi yang ditemukan dalam teks dan gambaran misinformasi. Tipe dan kategori misinformasi tersebut akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

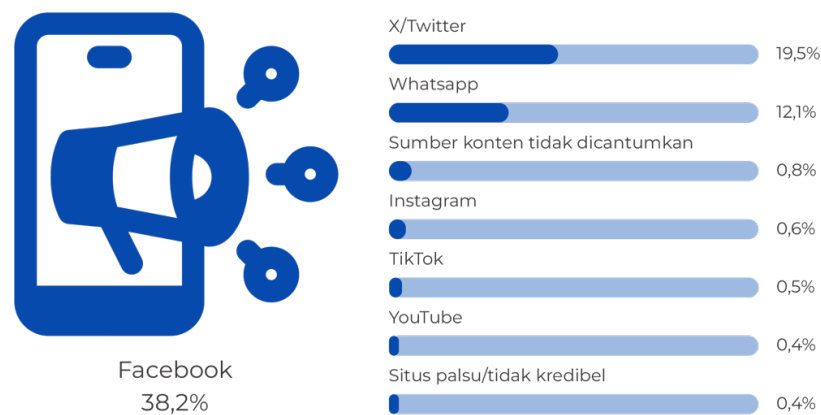
Berdasarkan 125 konten yang telah diverifikasi oleh keempat laman pengecekan fakta tersebut, terdapat 10 artikel yang memiliki konten misinformasi yang sama. Beberapa konten misinformasi yang muncul berulang tersebut di antaranya adalah:

Tabel 6 Konten Misinformasi Duplikasi dan Situs Pengecekan Fakta

No	Konten Misinformasi	Laman Web Pengecekan Fakta
1	<i>Human Meat Project</i> : Donasi Daging Manusia untuk Atasi Perubahan Iklim	CekFakta, Jalahoaks, Saberhoaks
2	Hillary Clinton Melarang Penggunaan Uang Tunai untuk Melawan Perubahan Iklim	Turnbackhoax, CekFakta, Jalahoaks
3	Kenaikan Air Laut Merupakan Hoaks	Turnbackhoax, CekFakta
4	Berita baru dari CNN: Perubahan Iklim akan Melanda Bumi Musim Panas Tahun Depan	Turnbackhoax, Jalahoaks

Sumber: Hasil olah data peneliti

Gambar 12 Sumber Konten Misinformasi



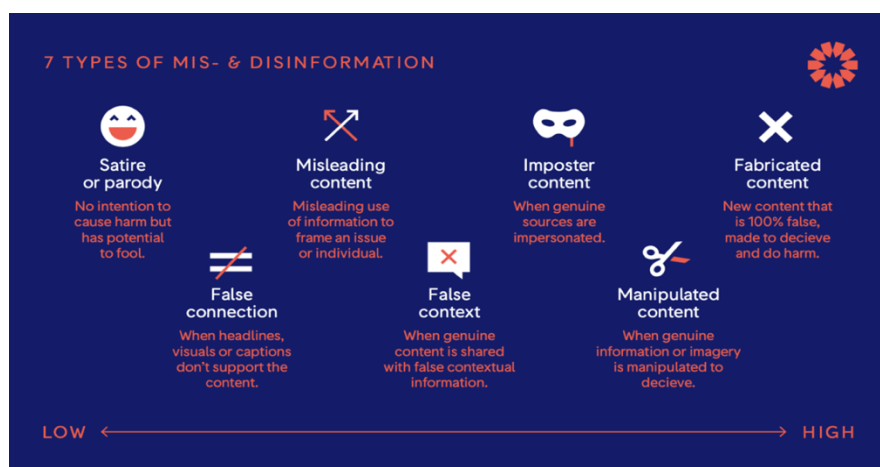
Sumber: Hasil olah data peneliti

Pembagian sumber konten tersebut didasarkan pada tangkapan layar dimana konten diperoleh para pengecek fakta, atau sumber yang disebutkan sebagai sumber utama dari konten misinformasi tersebut. Beberapa konten misinformasi tersirkulasi ke *platform* media sosial lain dan dibagikan dalam bentuk potongan layar atau dengan menyalin kata-kata yang sama sebagaimana dari sumber utamanya. Dapat dilihat bahwa misinformasi iklim banyak tersebar melalui media sosial daring di mana Facebook menjadi *platform* yang menjadi sumber utama konten tersebut ditemukan (38,2%), disusul dengan X/Twitter (19,5%) dan Whatsapp (12,1%).

4.3. Tipe dan Kategori Misinformasi

Berdasarkan Wardle (2020) setidaknya terdapat tujuh jenis misinformasi dan disinformasi, seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

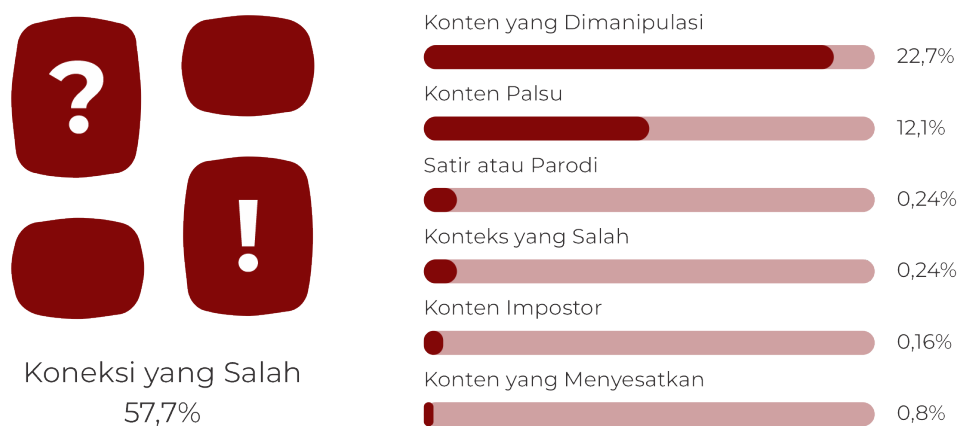
Gambar 13 Tujuh Jenis Misinformasi dan DisInformasi



Sumber: Wardle, 2020

Skala horizontal menunjukkan tingkat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari setiap jenis mis/disinformasi-- mulai dari sindiran/parodi, hingga tingkat dampak buruk tertinggi yang mungkin terjadi, yaitu konten yang dibuat-buat.

Gambar 14 Jumlah Konten terkait Misinformasi Iklim berdasarkan Kategori Misinformasi



Sumber: Hasil olah data peneliti

4.3.1 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Satir atau Parodi

Konten Satir atau Parodi mengacu kepada informasi yang tidak ditujukan untuk memberikan dampak buruk, namun memiliki potensi untuk disalahartikan oleh pembaca dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil analisis konten, hanya ditemukan satu konten (0,24%) yang masuk ke dalam kategori satir. Contoh konten satir atau parodi yang ditemukan pada studi ini adalah konten mengenai program donasi daging manusia untuk menekan jumlah populasi manusia dan mengatasi perubahan iklim.

Gambar 15 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Satir atau Parodi



Sumber: Jalahoaks

Misinformasi yang tersebar tersebut didasari oleh sebuah proyek seni konseptual satir yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada audiensnya mengenai pentingnya memahami perjanjian dalam layanan digital yang digunakan—menekankan bahwa terdapat banyak hak-hak digital dan informasi pribadi dari individu yang harus “dikorbankan” kepada platform atau penyedia layanan digital. Analogi daging manusia yang digunakan oleh proyek seni tersebut disalahartikan oleh beberapa individu dan disebarkan sebagai bentuk misinformasi yang menimbulkan kegaduhan dalam ruang interaksi daring. Padahal, dalam situs proyek seni itu juga telah disertakan keterangan mengenai tujuan proyek seni konseptual tersebut.

Contoh ini selaras dengan pernyataan Altay dkk (2023) yang menekankan fokus misinformasi kepada aspek perilaku yang berkaitan dengan respons individu terhadap sebuah informasi yang menimbulkan kepanikan. Dalam hal ini, proyek seni konseptual yang membawa isu daging manusia—jika tidak dibaca seutuhnya—menimbulkan kepanikan tersendiri dengan fokus utama terhadap isu moralitas yang menarik banyak individu lainnya untuk turut memberi komentar dan memperluas persebaran misinformasi tersebut.

4.3.2 Misinformasi Krisis Iklim berupa Koneksi yang Salah

Konten dengan koneksi yang salah mengacu pada informasi yang memiliki visual, keterangan, atau judul yang tidak mendukung konten sebenarnya. Berdasarkan hasil analisis konten, ditemukan terdapat 71 konten yang masuk ke dalam kategori ini (57,7%). Angka ini cukup tinggi dan dapat dilihat sebagai bentuk misinformasi yang paling banyak muncul di dalam data konten misinformasi iklim di Indonesia. Contoh konten tersebut adalah misinformasi mengenai pemanasan global, dimana terdapat klaim bahwa pemanasan global tidak nyata dan malah terjadi tren “pendinginan” global.

Gambar 16 Grafik Misinformasi Tren Pendinginan Global



Sumber: cekfakta

Meski demikian, angka dan klaim yang disebutkan dalam artikel tersebut tidak berhubungan. Angka-angka yang digunakan untuk menggambarkan tren “pendinginan” global dipastikan tidak akurat, karena tren perubahan iklim tidak dapat ditentukan hanya dengan data selama delapan tahun terakhir saja.

Contoh ini selaras dengan argumen sebelumnya pada hasil survei YouGov yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi sains juga dapat berkontribusi pada meningkatnya jumlah individu yang tidak mempercayai krisis iklim di Indonesia. Kemampuan berpikir kritis serta membaca dan menginterpretasikan data penting untuk menanggulangi informasi yang menyesatkan, terutama yang bertujuan untuk menarik perhatian/*clickbait* seperti tergambar dalam contoh tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dipahami bahwa tipe misinformasi ini merupakan kombinasi informasi (pada umumnya berasal dari suatu laman berita

dan/atau sumber informasi terpercaya) dan narasi yang salah. Informasi ini secara umum dapat dilihat pada gambar atau tangkapan layar dari sebuah berita. Informasi yang salah ini akan ditempelkan sebagai bagian dari narasi, baik dalam keterangan atau dalam tangkapan layar berita tersebut. Upaya untuk membuat konten berupa koneksi yang salah juga dapat dilihat sebagai salah satu konsekuensi dari kesulitan pengguna internet memahami informasi asli dalam suatu gambar, sehingga informasi derivatif yang diunggah menjadikan informasi yang salah.

Dalam konteks substansi dari temuan terhadap konten yang mengklaim bahwa pemanasan global tidak nyata dan malah terjadi tren “pendinginan” global, temuan ini memperkuat pendapat dari Coan dkk (2021) yang menyampaikan klaim bahwa pemanasan global tidak terjadi dan gas rumah kaca tidak menyebabkan pemanasan global. Hal ini dapat terlihat dari narasi yang ditemukan dalam konten, berdampingan dengan tangkapan layar terdapat narasi yang terlihat berupaya menjelaskan isi dari grafis dalam gambar. Namun alih-alih menjelaskan informasi yang tepat, narasi yang disampaikan justru memberikan informasi yang tidak tepat terkait krisis iklim, yaitu dengan menyampaikan bahwa telah terjadi pendinginan suhu bumi secara global ketimbang pemanasan suhu bumi.

Kondisi yang menunjukkan penyebaran narasi bahwa pemanasan global tidak benar-benar terjadi juga dapat ditemukan dalam hasil survei yang dilakukan. Sebanyak 82.1% responden dari survei penelitian ini menjawab bahwa pemanasan global tidak terjadi karena musim hujan tetap ada. Meskipun tidak terdapat kesamaan faktor penyebab pemanasan global antara konten yang ditemukan, dengan hasil survei, namun hal ini menunjukkan kondisi penyerapan informasi terkait krisis iklim oleh publik. Temuan ini menguatkan pernyataan Yuyun Harmono, manajer kampanye WALHI yang berpendapat kurangnya pendidikan tentang isu lingkungan di sekolah (Renaldi, 2019).

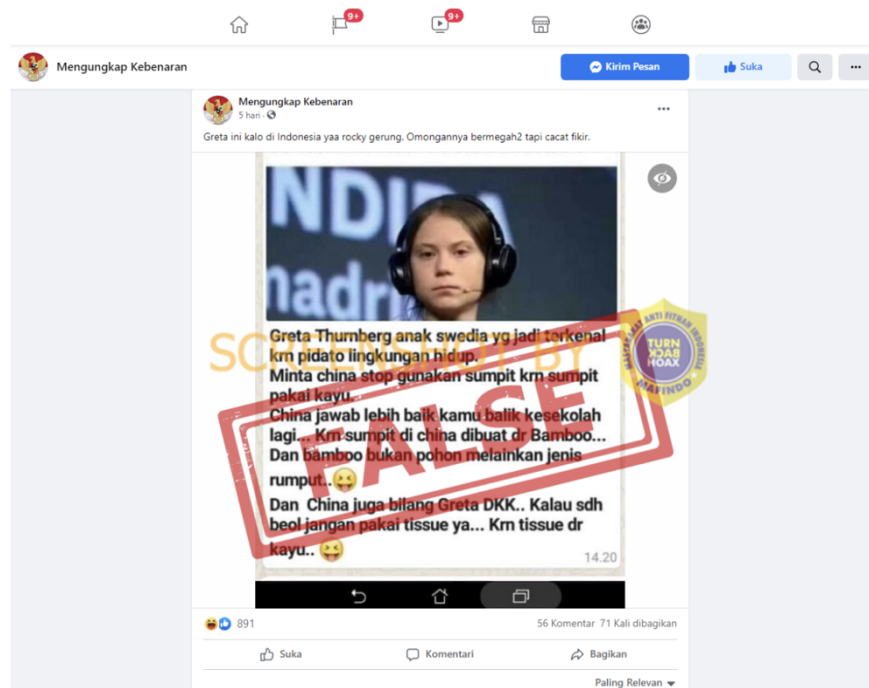
4.3.3 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten yang Menyesatkan

Konten yang menyesatkan mengacu pada konten misinformasi yang bertujuan untuk memberikan pembingkaian tertentu atas suatu isu atau satu sosok figur dengan menggunakan kutipan pernyataan dari individu yang dibingkai sedemikian rupa. Berdasarkan hasil analisis konten ditemukan satu (0,08%) konten yang masuk ke dalam kategori ini. Misalnya, ketika sebuah opini dipresentasikan sebagai sebuah fakta, atau yang ditemukan dalam artikel ini adalah upaya

“pemelintiran” pernyataan yang dilakukan oleh figur individu. Contoh konten tersebut adalah artikel dan pesan *broadcast* Whatsapp tentang pernyataan Greta Thunberg mengenai penggunaan sumpit, yang menyatakan bahwa warga Cina harus berhenti menggunakan sumpit karena sumpit terbuat dari kayu dengan menggunakan foto di mana Greta menyelenggarakan sebuah konferensi pers dan menyebutkan kemungkinan bahwa ia juga akan mengunjungi Cina. Berdasarkan penelusuran Reuters (2020), konten misinformasi pertama mengenai isu ini muncul di sebuah artikel di Cina dalam bahasa Mandarin dengan mengacu pada potongan wawancara yang Greta Thunberg lakukan dengan media Jepang mengenai kemungkinan kunjungannya ke beberapa negara di Asia, termasuk Cina. Pernyataan “*coming to China*” dalam konteks visitasi, dialihbahasakan menjadi sesuatu yang mengancam.

Di Indonesia, bentuk misinformasi dari pernyataan mengenai bambu tersebut ditambah dengan kalimat ejekan mengenai ketidaktahuan Greta mengenai bahan baku sumpit yang berasal dari Bambu. Meskipun demikian, telah dipastikan bahwa Greta tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam kegiatan apa pun.

Gambar 17 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten yang Menyesatkan



Sumber: Turnbackhoax

Greta Thunberg tidak dapat disangkal telah menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam pergerakan iklim secara global. Gerakan yang ia inisiasi, "Fridays for Future", telah menarik banyak perhatian masyarakat, tidak hanya dari negaranya, Swedia, tetapi juga di kalangan para pemimpin dunia. Konten palsu yang ditujukan terhadap Greta Thunberg tidak hanya menipu pembacanya tetapi juga merusak reputasi Greta dan menurunkan citranya sebagai seorang tokoh aktivis iklim.

Contoh dari konten Greta Thunberg tersebut dapat dilihat sebagai konten yang menyesatkan. Dalam contoh ini, ia memiliki elemen penyalahgunaan dari pernyataan yang menyebutkan negara Cina dalam wawancara dan disalahartikan—dengan sengaja untuk memberikan implikasi tertentu terhadap sosoknya. Berdasarkan temuan di atas, dapat ditemukan bahwa misinformasi berupa konten yang menyesatkan memiliki elemen terkait figur atau sumber otoritatif yang berhubungan dengan isu - isu tertentu (dalam hal ini krisis iklim) sebagai isu yang disebarkan misinformasinya. Secara khusus dalam isu krisis iklim, figur yang menjadi target narasi dalam tipe konten ini pada umumnya berseberangan dengan informasi atau narasi yang figur atau suatu sumber tersebut akan sampaikan atau bahkan dalam konteks ini, memiliki arti yang berbeda.

Temuan ini selaras dengan salah satu dari lima klaim umum yang mendukung misinformasi krisis iklim (Coan dkk, 2021). Salah satu dari lima klaim umum yang terkait adalah tentang bagaimana gerakan iklim dan ilmu iklim tidak dapat diandalkan. Pada temuan ini dapat diamati bahwa, misinformasi yang tersebar berusaha untuk mempengaruhi reputasi Greta Thunberg sebagai figur dalam isu krisis iklim dengan menempelkan foto Greta Thunberg dengan informasi yang tidak masuk akal. Hal ini dapat memberikan impresi bagi pihak yang membaca bahwa Greta Thunberg sebagai bagian dari gerakan iklim tidak dapat memberikan solusi yang masuk akal dan diandalkan dalam mengatasi krisis iklim.

Selain itu, temuan ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan friksi antara budaya, kebiasaan, atau kelompok dari golongan tertentu dengan upaya untuk melawan krisis iklim. Seperti yang disampaikan oleh Farkas dan Schou (2018), atribusi informasi palsu juga memiliki dua aspek politis. Pertama, konten terkait Greta Thunberg dapat mengadu domba antar Greta Thunberg dengan individu atau komunitas yang mempraktikkan budaya dan kebiasaan menggunakan sumpit, serta industri pembuat sumpit. Kedua, selaras dengan yang disampaikan oleh Coan dkk (2021), konten misinformasi ini menunjukkan dorongan politis yang berseberangan dengan gerakan melawan krisis iklim, dimana Greta Thunberg

sebagai tokoh sentral, melalui pemberian impresi bahwa gerakan iklim tidak dapat diandalkan.

4.3.4 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konteks yang Salah

Konten yang berkaitan dengan konteks yang salah ditunjukkan dengan adanya informasi atau ilustrasi yang pada dasarnya benar terjadi atau berupa fakta—namun dinarasikan pada konteks yang berbeda, sehingga menghasilkan bacaan yang menyesatkan. Seperti misalnya, klaim mengenai dampak kenaikan suhu bumi yang terjadi di negara Y, namun dinarasikan terjadi di negara X, sehingga menimbulkan kepanikan tersendiri bagi warga negara X. Berdasarkan analisis konten, ditemukan satu (0,08%) artikel yang masuk ke dalam kategori ini.

Contoh yang ditemukan pada data konten misinformasi yang peneliti temukan adalah klaim bencana banjir di Jakarta sebagai sebuah kejadian biasa yang telah terjadi semenjak masa kerajaan Nusantara—sebelum berdirinya negara Indonesia.

Gambar 18 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konteks yang Salah



Sumber: Turnbackhoax

Pada tangkapan layar atas konten misinformasi tersebut, foto yang ditampilkan dengan merujuk pada figur Ir. Sukarno, presiden pertama Republik Indonesia, sebenarnya merupakan foto yang diambil di kota Solo pada tahun 1947 dan bukan di kota Jakarta sebagaimana klaim dari penulis konten. Ilustrasi yang digunakan merupakan foto yang asli, namun konteks dari foto tersebut tidak sesuai dengan narasi yang tersedia. Foto fenomena banjir di Solo tentunya tidak bisa merepresentasikan fenomena banjir di Jakarta. Pesan tersirat yang dapat diambil dari unggahan tersebut—melihat banjir di Jakarta sebagai fenomena alam yang normal—dapat memberikan implikasi buruk mengenai upaya pencegahan bencana banjir yang seringkali merupakan salah satu bentuk bencana yang terkait dengan aktivitas manusia dan argumen bencana sebagai hal yang alamiah sebagaimana sering digunakan kelompok penyangkal krisis iklim.

Selain itu, temuan menarik dari unggahan tersebut adalah narasi mengenai kepemimpinan politik dimana bencana banjir tersebut terjadi. Dengan menekankan narasi bencana banjir yang sudah kerap terjadi pada masa kepemimpinan kerajaan sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, bahkan di era presiden pertama Indonesia sekalipun, menegasikan tuntutan terhadap pemimpin inkumben mengenai manajemen pengelolaan banjir dan pengelolaan air di Jakarta. Hal ini berkaitan dengan tema politik yang juga seringkali berhubungan dengan misinformasi iklim di Indonesia.

4.3.5 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Impostor

Konten impostor mengacu kepada konten palsu yang dibuat dengan sengaja menyerupai sebuah sumber informasi terpercaya (sebagai contoh: kantor berita dan media) untuk meningkatkan kepercayaan audiens terhadap informasi tersebut. Berdasarkan analisis konten, terdapat dua (0,16%) konten yang masuk ke dalam kategori ini. Sebagai contoh adalah potongan informasi yang menyerupai potongan artikel dalam laman web berita CNN mengenai isu perubahan iklim seperti tertera.

Gambar 19 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Impostor



Sumber: Jalahoaks

Sebagaimana dilihat dalam potongan *headline* artikel tersebut, terdapat logo dan juga format tata letak yang menyerupai potongan artikel yang dirilis dari web resmi CNN. Padahal, faktanya, CNN tidak pernah merilis berita tersebut maupun menggunakan ilustrasi yang serupa. Merespons persebaran misinformasi tersebut, CNN telah menyatakan bahwa potongan tangkapan layar artikel tersebut merupakan hasil suntingan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hal menarik yang dapat dilihat dari potongan informasi yang dengan sengaja dibuat menyerupai dengan berita CNN adalah potongan *headline* yang menggiring audiensnya untuk melihat krisis iklim dan kenaikan temperatur global sebagai sebuah candaan—bahwa kenaikan suhu adalah fenomena alami seperti perpindahan musim dari musim gugur ke musim panas. Potongan tangkapan layar artikel palsu tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas CNN sebagai sebuah kantor media dan juga masuk dalam kategori penyangkalan terhadap fakta terkait krisis iklim dan kenaikan temperatur bumi yang telah terjadi.

4.3.6. Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten yang Dimanipulasi

Tipe konten ini merujuk pada gambar yang benar namun dilakukan perubahan. Berdasarkan analisis konten, terdapat 29 (23,5%) konten yang masuk ke dalam kategori ini. Salah satu contoh dari tipe konten ini adalah berita yang diubah

tentang Hillary Clinton terkait pernyataannya melarang penggunaan uang kartal untuk melawan krisis iklim.

Gambar 20 “Hillary Clinton: Saatnya Melarang Uang Kartal Untuk Melawan Krisis Iklim”



Sumber: Turnbackhoax)

Pernyataan Hillary Clinton dalam pidatonya terkait pelarangan uang kartal untuk penanganan krisis iklim tidak pernah terjadi. Gambar dan acara dimana Hillary Clinton menyampaikan pidatonya adalah bagian dari kegiatan Clinton Global Initiative Commitment yang akan mendonasikan 50 juta dolar AS untuk menyelesaikan isu krisis iklim. Banyak dari inisiatif pemeriksa fakta, salah satunya Associated Press, menyatakan bahwa informasi terkait Hillary Clinton di atas, adalah informasi yang salah.

Jenis konten yang berupa misinformasi krisis iklim yang berupa konten yang dimanipulasi, jika dilihat secara sekilas memiliki kesamaan dengan misinformasi krisis iklim yang berupa konten yang menyesatkan. Namun, jika melihat dari konten pidato Hillary Clinton, maka konten yang dimanipulasi merupakan kombinasi sebagian informasi yang benar dan sebagian informasi yang salah. Informasi benar seperti pidatonya sendiri dan penyelenggaraan acara. Sementara informasi yang salah berupa ajakan penghentian penggunaan uang kartal. Jika konten yang menyesatkan adalah kombinasi antara informasi palsu dengan figur atau sumber

yang relevan dengan isu, maka konten yang dimanipulasi mengkombinasikan antara informasi asli dengan narasi yang salah.

Contoh konten ini meskipun mirip dengan analisis pada konten yang menyesatkan mengenai Greta Thunberg, terdapat sedikit perbedaan konteks. Konten misinformasi yang menjadikan Hillary Clinton sebagai subjek sentral dalam konten ini memiliki konteks penolakan krisis iklim antropogenik, khususnya di aspek *partisanship* (Uscinski, 2017). Hillary Clinton sebagai figur dari partai Demokrat dengan reputasi menerima konsensus ilmiah, menjadi target dari misinformasi ini yang menunjukkan kondisi polarisasi penerimaan isu krisis iklim. Sehingga dengan kondisi tersebut, maka konten ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Coan Dkk (2021) di mana konten misinformasi menunjukkan dorongan politis untuk memajukan tatanan yang berseberangan dengan sikap Demokrat sebagai 'penerima' isu krisis iklim.

4.3.7. Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Palsu

Konten ini disusun untuk mempengaruhi impresi, nilai, dan pengetahuan. Berdasarkan analisis konten, terdapat 15 (12,1%) konten yang masuk ke dalam kategori ini. Salah satu contoh dari narasi ini adalah konten yang menyampaikan bahwa *World Wildlife Fund* (WWF) merupakan organisasi mafia yang menyebarkan informasi bohong tentang krisis iklim, karbon pajak, dan vaksinasi.

Gambar 21 Misinformasi Krisis Iklim berupa Konten Palsu



Sumber: Turnbackhoax

Konten jenis ini menggunakan gambar yang mencoba agar para pembaca membuat asumsi tentang isu tertentu. Jenis konten ini jika dilihat sekilas memiliki hubungan dengan jenis misinformasi koneksi yang salah. Namun, menimbang informasi yang mengedepankan informasi yang salah terkait pihak tertentu, jenis konten ini berusaha untuk menggugah emosi tertentu dari publik. Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh di atas, narasi palsu yang dicoba untuk disebarluaskan berusaha membuat WWF sebagai organisasi mafia dengan figur, gambar, dan narasi tertentu melalui penyediaan konteks pada gambar.

Konten jenis ini jika disesuaikan dengan lima klaim umum yang mendukung misinformasi krisis iklim, khususnya terkait dengan gerakan iklim dan ilmu iklim tidak dapat diandalkan (Coan dkk, 2021) selaras dengan narasi yang menyatakan bahwa krisis iklim adalah agenda global untuk menyebarkan ketakutan dan mengendalikan masyarakat. Pendapat tersebut selaras dengan konten menyesatkan terkait WWF yang menyebutkan WWF sebagai organisasi mafia dan berusaha menyebarkan ketakutan, meskipun WWF sebagai organisasi yang mendukung upaya mengatasi krisis iklim tidak melakukan hal tersebut.

Kondisi kepercayaan publik bahwa organisasi yang aktif pada krisis iklim merupakan organisasi yang mendorong konspirasi, dengan isu krisis iklim sebagai agenda konspirasi juga dapat ditemukan dalam survei yang dilakukan. Sebanyak 24,2% dari responden survei dalam penelitian ini sepakat bahwa krisis iklim merupakan konspirasi penguasa global untuk mempertahankan kekuasaannya. Meskipun posisi WWF sebagai organisasi yang aktif mengatasi krisis iklim bukan merupakan bagian dari kekuasaan global, namun berdasarkan temuan konten ini serta pendapat dari Coan dkk (2021), dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat upaya - upaya untuk menumbuhkan impresi bahwa WWF adalah bagian dari kekuasaan global yang menyebarkan informasi terkait krisis iklim.

4.4. Relevansi Tema

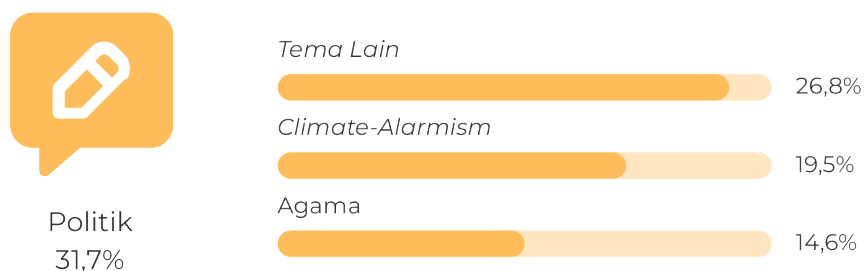
Dalam kajian ini setidaknya ditemukan empat kategori utama terkait topik disinformasi mengenai krisis iklim yang sering muncul dan tersebar di Indonesia.

1. kategori konten terkait isu politik merupakan bagian yang menjelaskan tentang temuan konten misinformasi iklim dengan nuansa politik dan/atau memiliki konteks politik. Meski tidak secara spesifik harus merujuk pada afiliasi politik tertentu, konten jenis ini mengandung misinformasi yang mempengaruhi figur, kondisi sosial budaya tertentu, atau memiliki pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat bagi isu krisis iklim (*climate deniers*). Perluasan konteks politik ini diperlukan mengingat persebaran misinformasi mengenai politik tidak hanya terbatas pada aspek politik praktis semata.
2. Kategori konten terkait isu keagamaan merujuk pada konten misinformasi terkait krisis iklim dengan nuansa keagamaan. Pengambilan tema ini menimbang tingginya hasil temuan survei penelitian yang menyebutkan bahwa krisis iklim adalah akibat dari kegiatan maksiat atau ketidakpatuhan terhadap perintah agama. Secara konteks, meskipun isu keagamaan dapat dikaitkan dengan politik, namun dalam pembahasan ini khusus untuk penyebutan simbol atau informasi

keagamaan tertentu akan disertakan dalam kategori ini, tidak termasuk ke dalam isu politik.

3. Kategori konten terkait isu "*climate-alarmism*" merujuk pada kategori konten yang secara substansi menyampaikan narasi tentang krisis iklim secara hiperbola. Kategori konten ini pada umumnya ditemukan dengan narasi yang melebih-lebihkan suatu fenomena terkait krisis iklim, bahkan cenderung menakut-nakuti para pembacanya. Secara konteks isu ini dapat memiliki keterkaitan dengan isu politik maupun keagamaan. Namun, untuk keperluan penelitian ini, jika dalam suatu temuan misinformasi ditemukan memiliki narasi yang bersifat hiperbola, menakut-nakuti, atau narasi dengan sifat yang berlebihan, maka akan dikategorikan sebagai kategori konten ini.
4. Kategori konten lainnya adalah kategori konten misinformasi lain yang ditemukan selama penelitian berlangsung untuk membentuk kerangka berpikir dan kerangka kerja penelitian ini. Meskipun terkait isu lingkungan seperti bencana alam (banjir, dsb), namun konten dalam kategori ini tidak secara spesifik membahas isu krisis iklim. Selain itu, narasi dalam konten ini tidak secara spesifik menarik perhatian (*appeal to emotion*) para pembacanya karena pada umumnya berupa informasi yang salah seperti informasi banjir di lokasi yang berbeda dengan lokasi aslinya. Karena variabel konten dalam kategori ini secara umum berbeda, maka tidak dilakukan analisis.

Gambar 22 Jumlah Konten terkait Misinformasi Iklim berdasarkan Relevansi Tema Misinformasi



Sumber: Hasil olah data peneliti

Berdasarkan temuan di atas, dapat dielaborasi bahwa tema politik dalam konten misinformasi krisis iklim menjadi tema dengan jumlah konten terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi suatu konten misinformasi lebih menarik perhatian ketika memiliki tema politik, bahkan jika dibandingkan dengan tema agama. Selain itu, cakupan konteks politik yang lebih luas, tidak hanya dari aspek politik praktis, namun tendensi kepercayaan pada posisi isu krisis iklim juga memberikan 'ruang' narasi yang

lebih luas dibandingkan dengan tema lainnya. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan *climate-alarmism*, jumlah konten dengan tema agama masih lebih rendah meskipun jika disandingkan dengan survei pada penelitian ini, sepertiga responden percaya bahwa bencana alam dan krisis iklim terjadi akibat kelalaian mematuhi perintah agama.

4.4.1. Konten terkait isu politik

Konten terkait isu politik menduduki konten dengan jumlah terbanyak pada penelitian ini yaitu 39 dari 123 konten atau setara dengan 31.7%. Secara umum temuan konten dengan isu politik memiliki narasi yang terkait dukungan atau 'serangan' terhadap posisi tertentu. Sebagai bagian dari konten ini adalah konten misinformasi tentang pernyataan figur otoritatif di isu krisis iklim seperti Greta Thunberg dan/atau Hillary Clinton, atau narasi yang mendukung pernyataan - pernyataan penolakan terhadap isu krisis iklim. Mengingat keterbatasan yang ada, kategori konten ini juga mencakup narasi terkait figur politik yang relevan dengan isu krisis iklim, misalnya misinformasi terkait banjir yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat dibandingkan dengan tanggung jawab bersama.

Dalam membahas konten terkait isu politik terdapat dua tujuan utama dari penyebaran misinformasi tipe ini. Pertama, kebanyakan dari konten yang ditemukan fokus pada teori konspirasi global, yang menimbulkan kepercayaan bahwa terdapat organisasi global yang mengorkestrasi isu krisis iklim dan pemanasan global. Sedangkan tujuan kedua fokus pada politik lokal, khususnya dalam konteks kegiatan pemilihan umum di Indonesia, yang menggeser penyebab dan menyalahkan krisis iklim sebagai akibat ulah tangan manusia seperti banjir, pada kandidat tertentu.

Gambar 23 Contoh 1: “Why the Globalist Fools Us with the Climate Change Narrative?”



Source: Jalahoaks

Contoh 1 di atas menjelaskan temuan dari Jalahoaks terhadap konten misinformasi yang menyatakan bahwa krisis iklim tidak nyata, dan merupakan konspirasi global. Dalam konten tersebut, krisis iklim diklaim sebagai upaya untuk menakut-nakuti manusia sebagai bagian dari konspirasi global, sama halnya dengan temuan misinformasi terkait WWF. Jenis konten ini merupakan salah satu dari lima klaim misinformasi krisis iklim paling umum seperti yang disampaikan oleh Coan, dkk. (2021) di mana telah ditemukan klaim bahwa gerakan iklim dan ilmu iklim tidak dapat diandalkan, serta merupakan bagian dari agenda globalis untuk menyebarkan ketakutan dan mengendalikan orang.

Gambar 24 Contoh 2: “Banjir Terbaru di Jakarta yang Terjadi di Era Kepemimpinan Pj Gubernur Heru”



Sumber: Jalahoaks

Contoh 2 di atas merupakan temuan konten misinformasi bencana alam dalam bentuk banjir yang dituduh diakibatkan (atau setidaknya dikaitkan) dengan figur tertentu, dalam hal ini Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Banjir sebagai bencana alam yang muncul di Jakarta, alih-alih merupakan ulah manusia secara komunitas, namun menimpakan kesalahan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Foto-foto tersebut merupakan foto banjir di Jakarta pada tahun 2020 dan 2021 yang tidak seharusnya merepresentasikan masa kepemimpinan PJ Gubernur tersebut.

Dari kedua contoh di atas, dapat ditemukan bahwa terjadi variasi konten misinformasi yang menunjukkan terjadi pergeseran subjek terkait krisis iklim. Jika narasi terkait bencana alam sebagai akibat dari krisis iklim, dahulu diklaim merupakan sebuah informasi bohong yang disebarkan oleh aktor konspirasi global, subjek terkait bencana alam bergeser menjadi figur tertentu. Tidak dapat dipungkiri nuansa politik, khususnya dalam temuan contoh 2 di atas sangat kental. Temuan ini selaras dengan salah satu klaim umum yang disampaikan oleh Coan, dkk. (2021) yaitu solusi iklim tidak berhasil, sebagaimana diperkuat dalam contoh yang disebutkan Folia (2019), bahwa orang Indonesia meragukan kapasitas perwakilan dan politik lembaganya.

4.4.2. Konten terkait isu keagamaan

Konten terkait isu keagamaan yang ditemukan pada penelitian ini berjumlah 18 dari 123 konten atau setara dengan 14.6%. Secara umum temuan konten terkait isu keagamaan memiliki narasi yang menyebutkan nilai-nilai agama tertentu dan dikaitkan dengan kondisi bencana alam. Keterkaitan antara nilai keagamaan dan kondisi bencana alam disusun sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai suatu narasi sebab akibat. Dengan sepertiga jumlah responden yang memercayai bahwa pelanggaran terhadap perintah agama adalah sebab dari kemunculan bencana alam, menjadikan konten isu keagamaan sebagai salah satu konten yang memvalidasi narasi keagamaan masih menjadi narasi yang ampuh dalam penyebaran misinformasi.

Konten jenis ini menarik perhatian para pembaca dengan menyisipkan pesan keagamaan. Salah satu contoh yang ditemukan adalah misinformasi dengan sisipan pesan keagamaan, di mana pada konten tersebut diklaim bahwa banjir di Jakarta terjadi akibat “tangisan para malaikat” yang terharu oleh kegiatan keagamaan yang terjadi di Jakarta. Konten ini memiliki dampak bagaimana publik seharusnya merespon terhadap bencana alam, mengurangi inisiatif publik untuk menghentikan banjir.

Gambar 25 Contoh 1: “Banjir di Jakarta adalah Air Mata Malaikat yang Jatuh dari Langit - Para Malaikat tersebut tergerak oleh Sholat Berjamaah Para Alumni 212 di Monas”



Sumber: Kominfo.go.id

Sisipan pesan keagamaan juga dapat ditemukan dalam beberapa konten terkait bencana alam yang menyebutkan bahwa bencana yang terjadi merupakan hukm dari Tuhan akibat tindakan maksiat, sebagaimana terlihat pada contoh di bawah.

Gambar 26 Contoh 2: “Narasi “Sebelum Banjir Miras Allah Dahului Dengan Banjir Bandang!”



Sumber: Turnbackhoax

Dari kedua contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu keagamaan kerap dikaitkan dalam narasi mengenai kondisi krisis iklim. Hal ini dapat terlihat dari narasi yang mengaitkan kejadian alam atau bencana alam sebagai suatu perbuatan Tuhan. Meskipun tidak dapat dipungkiri, khusus untuk contoh 1, konten tersebut secara konteks dikaitkan dengan suatu peristiwa politik. Sehingga, walaupun berbalut pesan keagamaan narasi dalam contoh 1 juga memiliki tujuan politik tertentu. Kondisi ini selaras dengan pendapat Uscinski (2017) yang menunjukkan bahwa perilaku partisan menjadi komponen yang paling konsisten untuk menjelaskan penyangkalan krisis iklim. Alih - alih mengakui bahwa krisis iklim terjadi karena ulah manusia, kedua konten di atas menimpakan penyebab terjadinya bencana alam pada kondisi keagamaan, bahkan contoh 1 mengaitkan tindakan politik pada isu keagamaan yang berakibat pada bencana alam. Jika disandingkan dengan survei yang dilakukan, terdapat kesamaan impresi, di mana berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa sepertiga responden (21.5% setuju dan 11% sangat setuju) memiliki persepsi bahwa krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia yang melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya. Kondisi ini juga semakin memperkuat anggapan bahwa masyarakat Indonesia masih tidak mengaitkan fenomena bencana alam dengan krisis iklim yang bersifat

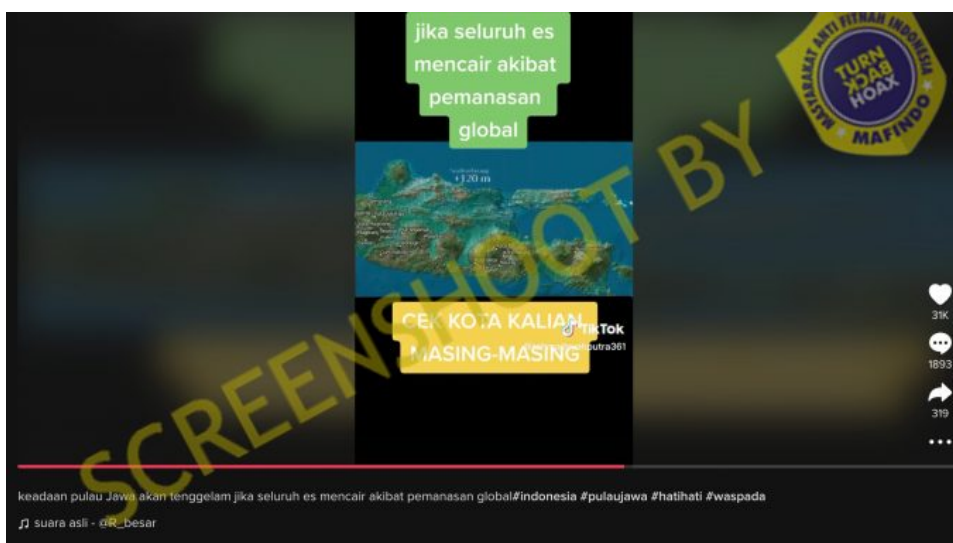
antropogenik, dan tidak menganggap krisis iklim sebagai masalah yang mendesak (Communication for Change, 2021).

4.4.3. Climate-alarmism

Konten terkait isu climate-alarmism yang ditemukan pada penelitian ini berjumlah 24 dari 123 konten atau setara dengan 19.5%. Secara umum temuan konten terkait isu climate-alarmism memiliki narasi yang menyebutkan informasi krisis iklim namun dengan narasi hiperbolis. Konten ini menjadi konten terbanyak kedua yang ditemukan beredar di media sosial Indonesia. Beberapa konteks terkait climate-alarmism terlihat memiliki narasi yang terkait dengan isu lingkungan dekat audiensnya.

Beberapa contoh konten yang ditemukan dalam penulisan ini pada umumnya berusaha mereduksi bahaya dari krisis iklim. Selain itu, turut ditemukan berbagai misinformasi dengan muatan yang memiliki tendensi untuk menakut-nakuti dan melebih-lebihkan implikasi dan krisis iklim. Sebagaimana dicantumkan dalam contoh berikut, telah beredar video berbahasa Indonesia pada platform TikTok yang mengklaim bahwa seluruh Pulau Jawa akan tenggelam di bawah laut kecuali beberapa puncak gunung. Konten ini telah diklarifikasi oleh beberapa media (Antara, 2023) dengan menyertakan informasi rujukan dari media National Geographic yang menyatakan bahwa Pulau Jawa memang akan merasakan naiknya air laut namun hanya 65,8 meter dan tidak menyebabkan pulau Jawa tenggelam (National Geographic, 2013).

Gambar 27 “Pulau Jawa Akan Tenggelam Akibat Pemanasan Global”



Sumber: Turnbackhoax

Temuan *Climate-Alarmism* ini menjadi salah satu bentuk jenis misinformasi berdasarkan relevansi temanya. Meski jika dilihat secara sekilas konten ini bertujuan untuk memberikan peringatan bahaya terhadap krisis iklim, sehingga upaya untuk mereduksi langkah penanganan krisis iklim tidak terjadi, namun jenis konten ini berpotensi untuk menjadi bumerang dalam upaya penanganan krisis iklim. Hal ini mengingat bahwa narasi *climate-alarmism* yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi para penolak krisis iklim dan menjadikan *climate-alarmism* sebagai sebuah kekhawatiran yang mengada-ada. Salah satu contoh penolakan ini dapat ditemukan dalam opini yang ditulis oleh Bradley (2023) yang menyatakan bahwa *Climate-Alarmism* saat ini sudah menggunakan narasi yang berlebihan menimbulkan ketidakpercayaan pada isu krisis iklim. Kritik lain terhadap *climate-alarmism* juga dapat ditemukan terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa saat ini dunia tidak lagi dalam masa *global warming*, melainkan *global boiling*. Kritik yang disampaikan oleh Bjorn Lomborg menyatakan bahwa meskipun krisis iklim adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan, namun bukan berarti menjustifikasi penyelesaian dengan cara - cara yang sulit atau membutuhkan sumber daya yang sangat besar, ketimbang mencari jalan tengah. Sehingga dalam hal *climate-alarmism* perlu dipertimbangkan untuk memastikan kehadiran narasi yang sesuai fakta dan tidak hiperbola (Jakarta Post, 2023.)

5. PENUTUP

Laporan penelitian yang berjudul “Menangkal Misinformasi Krisis Iklim di Indonesia” disusun untuk menjawab dua pertanyaan penting: *pertama*, Bagaimana pemahaman, pola konsumsi dan kemampuan literasi digital pengguna internet Indonesia terkait misinformasi krisis iklim? *Kedua*, bagaimana ragam misinformasi krisis iklim yang ditemukan dan diverifikasi oleh beragam sumber cek fakta terpercaya di Indonesia?

Survei daring terhadap 2401 responden menjawab pertanyaan mengenai pemahaman, pola konsumsi, dan kemampuan literasi digital pengguna internet di Indonesia terkait misinformasi krisis iklim dengan beberapa temuan penting. *Pertama*, 24.2% responden percaya bahwa krisis iklim adalah rekayasa buatan yang diciptakan oleh penguasa global yang artinya mereka percaya pada teori konspirasi global. *Kedua*, sepertiga responden (21.5% setuju dan 11% sangat setuju) memiliki persepsi bahwa krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia yang melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya. *Ketiga*, lebih dari 25% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa ilmuwan yang meneliti krisis iklim dikendalikan oleh kaum elit. *Keempat*, lebih dari separuh responden (63.5%) menjawab bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama mereka terkait topik krisis iklim. *Kelima*, lebih dari seperempat responden, 19.9% setuju dan 6.6% sangat setuju, dengan pernyataan bahwa upaya pemerintah mengurangi emisi bahan bakar bertentangan dengan cara hidup demokratis. *Keenam*, hampir separuh responden (47.1%) menyatakan bahwa mereka pernah mencari informasi terkait krisis iklim, namun dengan intensitas yang tidak terlalu sering. *Ketujuh*, hampir seluruh responden (98%) responden mengaku pernah menemukan konten bermuatan misinformasi krisis iklim di media sosial. *Kedelapan*, mayoritas responden, hingga nyaris mencapai 74% responden mengaku percaya diri dengan kemampuan mengidentifikasi misinformasi yang berkaitan dengan krisis iklim di media sosial. *Kesembilan*, lebih dari separuh responden (62.3%) menyatakan bahwa respon yang diberikan berhenti pada tahapan memverifikasi kebenaran informasi dan hanya sebagian kecil responden (20%) membuat konten kontra narasi untuk melawan misinformasi krisis iklim.

Pertanyaan kedua dijawab dengan melakukan analisis konten terhadap 123 konten misinformasi iklim (krisis iklim, pemanasan global, dan bencana alam) yang didapatkan dari empat sumber cek fakta yakni: www.cekfakta.com, www.turnbackhoax.id, www.jalahoaks.jakarta.go.id, dan www.saberhoaks.jabarprov.go.id. Berdasarkan analisis konten yang dilakukan, terdapat

beberapa temuan penting mengenai persebaran misinformasi iklim yang tersebar di ruang daring di Indonesia.

Pertama, Konten misinformasi seringkali terhubung dengan nama tokoh atau otoritas terkait dengan isu yang beredar tentang informasi palsu tersebut. Narasi yang disorot dalam jenis konten ini biasanya berlawanan dengan pernyataan sebenarnya yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Konten misinformasi tersebut biasanya dibuat dengan menggabungkan informasi atau gambar dari sumber yang berwenang, dan informasi palsu berupa keterangan/teks penjelasan gambar tersebut. Khusus terkait dengan isu perubahan iklim, terlihat bahwa figur atau otoritas adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap isu perubahan iklim, seperti contoh mengenai Greta Thunberg dan Hillary Clinton.

Kedua, Jumlah konten misinformasi pada keempat laman web pengecekan fakta banyak berfokus kepada konten-konten yang berkaitan dengan politik ataupun pemilihan umum, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Oleh karenanya, tidak terlalu banyak ditemukan konten-konten khusus terkait misinformasi iklim. Namun, di sisi lain, misinformasi iklim juga tidak dapat dilepaskan dari isu-isu dan misinformasi politik yang berkembang pada masyarakat sebagaimana contoh yang menyebutkan mengenai narasi krisis iklim dan upaya penguasaan dunia oleh sekelompok “elit global” maupun narasi untuk menjatuhkan kredibilitas dari tokoh politik tertentu. Seperti misalnya, pada konteks politik domestik, contoh konten terkait kegagalan pengelolaan banjir di Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Hal ini sejalan dengan temuan pada survei yang menyebutkan bahwa terdapat 24,2% responden yang memandang isu krisis iklim sebagai sebuah isu yang sengaja dikelola oleh sekelompok orang tertentu.

Ketiga, literasi dan kemampuan berpikir kritis memegang peran penting dalam upaya pencegahan persebaran misinformasi iklim di Indonesia. Berdasarkan hasil cek fakta yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga cek fakta di Indonesia, bentuk misinformasi yang menyajikan figur grafis seringkali disertai dengan narasi atau pembacaan yang tidak sesuai dengan grafik yang ditampilkan. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan kapasitas kemampuan individu untuk dapat mengkritisi paparan informasi dan membedakan sumber berita yang kredibel atau tidak. Pada temuan analisis konten, terdapat tingginya jumlah konten yang masuk dalam kategori koneksi yang salah (71%) di mana adanya tendensi menggunakan judul atau *caption* yang bersifat “*clickbait*”. Hasil dari pengecekan fakta yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dan relawan pada keempat laman web tersebut tentunya dapat membantu publik untuk mengasah kemampuan literasi dan berpikir kritis mereka dengan melihat tren dan

juga pola persebaran misinformasi yang terjadi pada ruang daring. Oleh karena itu, keberadaan inisiasi-inisiasi masyarakat sipil dan juga pemerintah pada level nasional maupun daerah dilihat sebagai langkah positif yang perlu terus didukung untuk dapat memajukan literasi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian baik yang diperoleh melalui survei daring dan analisis konten mengenai misinformasi krisis iklim di Indonesia, terdapat tiga hal penting yang saling berkaitan dan bisa digarisbawahi. *Pertama*, sumber misinformasi krisis iklim paling banyak terdapat di media sosial meskipun urutan yang ditemukan di survei pengguna dan analisis konten tidak sama persis. *Kedua*, teori konspirasi krisis iklim muncul baik di persepsi pengguna terkait informasi krisis iklim maupun dalam konten misinformasi yang diverifikasi oleh berbagai lembaga cek fakta. *Ketiga*, literasi digital pengguna internet dalam menavigasi informasi krisis iklim sangat urgen untuk ditingkatkan dengan beragam program kolaboratif yang diselenggarakan oleh berbagai kepentingan yang relevan. Bahkan analisis konten juga menunjukkan bahwa penjelasan berbagai lembaga cek fakta dalam melakukan verifikasi fakta misinformasi krisis iklim juga merupakan bagian untuk melakukan edukasi pada pengguna internet.

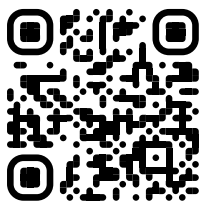
Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang sifatnya akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian mengenai pemetaan kebijakan pencegahan dan penanganan misinformasi lingkungan yang tak hanya meliputi misinformasi krisis iklim, namun juga misinformasi mengenai iklim secara umum, kebencanaan, maupun pemanasan global. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pencegahan dan penanganan misinformasi krisis iklim yang melibatkan beragam pemangku kepentingan yakni pemerintah, institusi pendidikan, beragam komunitas terkait (Lingkungan Hidup, Cek Fakta, dan Literasi Digital, dan komunitas lain yang relevan), tokoh agama dan masyarakat, *social influencer*, dan pengguna internet. Beragam program yang bisa dilakukan untuk pencegahan misinformasi krisis iklim antara lain adalah cek fakta, *media monitoring*, penyediaan informasi krisis iklim yang memadai, penelitian, dan literasi. Sedangkan beragam program penanganan antara lain adalah mekanisme penyediaan laporan misinformasi krisis iklim maupun pembentukan satuan tugas (satgas) kolaboratif penanganan misinformasi krisis iklim. Program-program tersebut bisa dilakukan masing-masing pemangku kepentingan maupun secara kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Allgaier, J. (2019). Science and Environmental Communication on YouTube: Strategically Distorted Communications in Online Videos on Climate Change and Climate Engineering. *Frontiers in Communication*, 4, 36. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00036>
- Altay, S., Berriche, M., & Acerbi, A. (2023). Misinformation on Misinformation: Conceptual and Methodological Challenges. *Social Media + Society*, 9(1), 20563051221150412. <https://doi.org/10.1177/20563051221150412>
- Arif, A. (2019, May 12). Masyarakat Indonesia Paling Tidak Percaya Perubahan Iklim Ulah Manusia. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/13/masyarakat-indonesia-paling-tidak-percaya-perubahan-iklim-ulah-manusia> [kompas.id](https://www.kompas.id)
- Avaaz (2020) Why is YouTube Broadcasting Climate Misinformation to Million? Laporan bisa diunduh dari: https://avaazimages.avaaz.org/youtube_climate_misinformation_report.pdf
- Barker, D. C., & Bearce, D. H. (2013). End-times theology, the shadow of the future, and public resistance to addressing global climate change. *Political Research Quarterly*, 66(2), 267–279.
- Begley, S., Conant, E., Stein, S., Cliff, E., & Philips, M. (2007). The truth about denial. *Newsweek*, 150(7), 20–27.
- Bradley, Robert L. (2023) Climate Alarmism at War With Itself, <https://www.instituteforenergyresearch.org/climate-change/climate-alarmism-at-war-with-itself/>
- Burke, A., Fishel, S., Mitchell, A., Dalby, S., & Levine, D. J. (2016). Planet Politics: A Manifesto from the End of IR. *Millennium*, 44(3), 499–523. <https://doi.org/10.1177/0305829816636674>
- Carrington, D., & editor, D. C. E. (2019, May 17). Why the Guardian is changing the language it uses about the environment. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment>
- Chandler, D., Cudworth, E., & Hobden, S. (2018). Anthropocene, Capitalocene and Liberal Cosmopolitan IR: A Response to Burke et al.'s 'Planet Politics'. *Millennium*, 46(2), 190–208. <https://doi.org/10.1177/0305829817715247>
- Coan, T. G., Boussalis, C., Cook, J., & Nanko, M. O. (2021). Computer-assisted classification of contrarian claims about climate change. *Scientific Reports*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-01714-4>
- Communication for Change. (2021). *Lain Padang Lain Belalang atau Satu Lubuk Sama Ikannya?* Development Dialogue Asia and Communication for Change. <https://www.developmentdialogueasia.com/pesan-perubahan-iklim>
- Cook, J., Ecker, U., & Lewandowsky, S. (2015). Misinformation and How to Correct It. In *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences* (pp. 1–17). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0222>

- Farkas, J., & Schou, J. (2018). Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood. *Javnost - The Public*, 25(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463047>
- Farmer, G. T., & Cook, J. (2013). Understanding Climate Change Denial. In G. T. Farmer & J. Cook (Eds.), *Climate Change Science: A Modern Synthesis: Volume 1—The Physical Climate* (pp. 445–466). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5757-8_23
- Fishel, S., Burke, A., Mitchell, A., Dalby, S., & Levine, D. (2018). Defending Planet Politics. *Millennium*, 46(2), 209–219. <https://doi.org/10.1177/0305829817742669>
- Folia, R. (2019, February 18). *Pengamat: Jokowi dan Prabowo Gagal Paham Soal Lingkungan Hidup*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/pengamat-jokowi-dan-prabowo-gagal-paham-soal-lingkungan-hidup>
- Franta, B. (2022). Weaponizing economics: Big Oil, economic consultants, and climate policy delay. *Environmental Politics*, 31(4), 555–575. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1947636>
- Friedman, T. L. (2010, February 17). Global Weirding Is Here. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2010/02/17/opinion/17friedman.html>
- Gurgun, S., Arden-Close, E., Phalp, K., & Ali, R. (2023). Online silence: why do people not challenge others when posting misinformation?. *Internet Research*, 33(5), 1928–1948.
- Handoko, T. (2021, November 30). *Bagaimana Misinformasi Memperparah Krisis Iklim*. Remotivi. <https://www.remotivi.or.id/headline/konsep-dan-isu/727>
- Hasyim, I., & Siswadi, A. (2018, July 10). *[Fakta atau Hoax] Benarkah Aphelion Penyebab Suhu Dingin di Berbagai Daerah ?* Tempo. [//cekfakta.tempo.co/fakta/43/fakta-atau-hoax-benarkah-aphelion-penyebab-suhu-dingin-di-berbagai-daerah](http://cekfakta.tempo.co/fakta/43/fakta-atau-hoax-benarkah-aphelion-penyebab-suhu-dingin-di-berbagai-daerah)
- Hunter, L. Y. (2023). Social media, disinformation, and democracy: How different types of social media usage affect democracy cross-nationally. *Democratization*, 30(6), 1040–1072. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2208355>
- Jenkins, W., Berry, E., & Kreider, L. B. (2018). Religion and climate change. *Annual review of environment and resources*, 43, 85–108.
- Kurnia, N., Wendratama, E., Rahayu, R., Adiputra, W. M., Syafrizal, S., Monggilo, Z. M. Z ... Sari, Y. A. (2020). *WhatsApp group and digital literacy among Indonesian women*. Yogyakarta: WhatsApp, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, PR2Media & Jogja Medianet.
- Kurnia, N., Nurhajati, L., & Astuti, S.A. (eds.) (2020) *Kolaborasi Lawan (Hoaks) COVID-19: Kampanye, Riset dan Pengalaman Japelidi di Tengah Pandemi*. Yogyakarta: Prodi Magister Ilmu Komunikasi & Japelidi.
- Lomborg, Bjorn (2023) *The missing context to climate alarmism* <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/09/02/the-missing-context-to-climate-alarmism.html>.
- Maulana, A., Suryanto, P., Widiyatno, W., Faridah, E. & Suwignyo, B. (2019). Dinamika Suksesi Vegetasi pada Areal Paska Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan* no 13, 181–194.
- Meijers, M. J., Van Drunen, Y., & Jacobs, K. (2023). It's a hoax! The mediating factors of populist climate policy opposition. *West European Politics*, 46(7), 1288–1311. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2145447>

- Oreskes, N., & Conway, E. M. (2011). *Merchants of doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to climate change* (Paperback edition, Nachdruck). Bloomsbury.
- Posetti, J. & Bontcheva, K. (2020) Policy Brief 1: Disinfodemic Deciphering COVID-19 disinformation. Paris: UNESCO
- Renaldi, A. (2019, June 14). *Indonesia Is Home to the Most Climate Change Deniers in the World*. VICE. <https://www.vice.com/en/article/a3x3m8/indonesia-climate-change-deniers-yougov-poll>
- Reuters, (2020, 13 May). *False claim: Greta Thunberg told Chinese and Japanese governments to stop using chopsticks*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/idUSKBN22P2PD/>
- Salkrye. (2018, September 21). *Ngaku Pinter? Jangan Mau Dibohongi, Global Warming itu Hoax!!!* [Online Forum]. KASKUS. <https://www.kaskus.co.id/thread/5ba4a12b6208812e228b4567/ngaku-pinter-jangan-mau-dibohongi-global-warming-itu-hoax>
- Setiawan, A. (2022). *Keragaman Hayati di Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya*. Indonesian Journal of Conservation 11(1) (2022) 13-21
- Sombatpoonsiri, J., & Luong, D. N. (2022). *"Justifying Digital Repression via 'Fighting Fake News': A Study of Four Southeast Asian Autocracies"* by Janjira Sombatpoonsiri and Dien Nguyen An Luong (Trends in Southeast Asia). ISEAS - Yusof Ishak Institute. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/06/TRS11_22.pdf
- Treen, K. M. d'I., Williams, H. T. P., & O'Neill, S. J. (2020). Online misinformation about climate change. *WIREs Climate Change*, 11(5), e665. <https://doi.org/10.1002/wcc.665>
- Uscinski, J. E., & Olivella, S. (2017). The conditional effect of conspiracy thinking on attitudes toward climate change. *Research & Politics*, 4(4), 2053168017743105. <https://doi.org/10.1177/2053168017743105>
- Wardle, C. (2020, September 20). *Understanding Information Disorder: Essential Guides*. First Draft News. <https://firstdraftnews.org/long-form-article/understanding-information-disorder/>
- YouGov. (2019). *Globalism All Markets*. YouGov PLC. https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/055akcr6zk/Globalism2019_%20Guardian_Various_2.pdf
- YouGov. (2020). *Globalism*. YouGov PLC. <https://docs.cdn.yougov.com/rhokagcmxq/Globalism2020%20Guardian%20Climate%20and%20Lifestyle%20after%20COVID.pdf>
- YouGov. (2021). *The Globalism Project*. YouGov PLC. <https://docs.cdn.yougov.com/5pth7rkugw/YouGov%20Cambridge%20-%20Globalism%202021%20-%20OMGLOB131%20CONSPIRACY%20THEORIES.pdf>



CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
RUANG BC 201-202, GEDUNG BC LANTAI 2,
JL. SOCIO YUSTISIA 1
BULAKSUMUR, YOGYAKARTA, 55281, INDONESIA

GO-WORK JAKARTA
LANTAI 38
MILLENNIUM CENTENNIAL CENTER,
JL. JENDERAL SUDIRMAN
NO.KAV. 25, JAKARTA PUSAT

TELEPON : (0274) 563362, Ext. 116 | +62 838 6969 8181
EMAIL : cfds.fisipol@ugm.ac.id
SITUS WEB : digitalsociety.id

 facebook.com/cfdsugm

 Center for Digital Society (CfDS)

 [cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)

 [cfds_ugm](https://soundcloud.com/cfds_ugm)

 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [CfDS UGM](https://www.youtube.com/CfDS_UGM)

